



LAPORAN KINERJA 2024

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi (Renstra) serta Perjanjian Kinerja.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja selalu diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, disampaikan terimakasih

Pelaihari, 16 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Pasal 18 PERPRES tersebut, menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyajikan beberapa hal mengenai indikator pencapaian, baik melalui pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran. Indikator sasaran tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja - Perubahan Tahun 2024, pada dasarnya telah terakomodir dalam indikator tahun 2024.

Pada tahun 2024, Realisasi Proses Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut di angka 99,31%, sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 92,36%.

Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan ada kesungguhan, keseriusan, dan komitmen yang kuat, serta kerja sama dari semua pihak terkait untuk saling mengisi maupun memberikan saran atau masukannya kepada seluruh jajaran ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 16 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



DIS. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Cascading Kinerja	2
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	5
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	8
I. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Tujuan dan Sasaran Kabupaten	11
B. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	23
1. Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama).....	23
2. Eselon III (Pejabat Administrator)	31
3. Eselon IV (Pejabat Pengawas)	50
B. Akuntabilitas Keuangan	58
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	58
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	59
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	63

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Cascading Kinerja
2. IKU
3. Pohon Kinerja
4. Perjanjian Kinerja 2024
5. Capaian Kinerja Per Triwulanan (I – IV)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanah Laut salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dimana strukturnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BAPENDA Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 18 menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaannya juga telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014.

Berakhirnya tahun 2024 menunjukkan BAPENDA Kabupaten Tanah Laut telah menyelesaikan pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran. Atas hasil kerja dan capaian kinerja dalam satu tahun ini disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pelaporan penyampaian kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja SKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dibuat dengan maksud memaparkan hasil kinerja Bapenda selama tahun anggaran 2024, dari Kepala Badan (Eselon II / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), Eselon III (Pejabat Administrator), dan Eselon IV (Pejabat Pengawas). Tujuan dibuatnya Laporan Kinerja ini yaitu :

1. Melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Melaksanakan Evaluasi SAKIP 2024

C. Dasar Hukum

LKj BAPENDA Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 disusun berdasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

D. *Cascading* Kinerja

Cascading (Penjabaran) Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*casuality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*aligment*).

Cascading Kinerja dimulai dengan Tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut yang dilanjutkan dengan Sasaran RPD. Sasaran RPD ini menjadi Tujuan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), lalu dilanjutkan dengan Sasaran OPD yang akan menjadi tanggung jawab Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama). Selanjutnya Program yang

dijalankan oleh OPD memiliki Sasaran Program yang akan menjadi tanggung jawab Eselon III (Pejabat Administrator). Dibawah Program ada Kegiatan dan dibawahnya lagi ada Sub Kegiatan. Sub Kegiatan yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 ini akan menjadi kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). *Cascading* Badan Pendapatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menurut Pasal 30 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022, yaitu

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah.
4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.

5. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan, terdiri atas;
 - a. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan; dan
 - b. Sub Bidang Retribusi Daerah;
6. UPTD Badan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Proses Bisnis Bapenda sebagaimana Tugas dan Fungsinya yakni menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini berlandaskan pada 4 pilar utama, yakni :

1. Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
2. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horinzontal melalui TKD (Transfer ke Daerah) dan Pembiayaan Utang Daerah
3. Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah
4. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan kesinambungan fiskal

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Otonomi Daerah diharapkan secara perlahan mampu untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga secara perlahan bantuan dari Pemerintah Pusat dapat berkurang dan Kemandirian Fiskal dapat terwujud. Tingkat Kemandirian Fiskal ini diperoleh dari Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun berjalan dibagi Realisasi Pendapatan Daerah tahun Berjalan. Kemandirian Fiskal dalam kategori Menuju Mandiri (25% < - < 50%) harus didukung dengan Pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sumber PAD ada 4, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Tanah Laut dalam 5 Tahun terakhir masih pada kisaran 8-9% atau masih dalam kategori Belum Mandiri. Bapenda dalam meningkatkan PAD, bekerja secara langsung pada sumber Pajak Daerah, sedangkan pada

3 Sumber lainnya hanya bisa melakukan koordinasi dengan SKPD dan BLUD/UPT yang memiliki tugas pada 3 Sumber PAD tersebut, sehingga untuk meningkatkan kemandirian fiskal perlu didukung SKPD dan BLUD/UPT lainnya.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Sumber daya manusia / susunan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 41 orang terdiri dari 28 orang ASN dan 15 orang PTT yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat Jabatan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan	1	Pimpinan
2.	Sekretaris	-	Pejabat Administrator
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	Pejabat Pengawas
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Pejabat Pengawas
5.	Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan	1	Pejabat Administrator
6.	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
7.	Kasubbid Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
8.	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	1	Pejabat Administrator
9.	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
10.	Kasubbid Pelayanan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
11.	Kabid Pendapatan Lain-lain, Retda dan Pelaporan	1	Pejabat Administrator
12.	Kasubbid Retda	-	Pejabat Pengawas
13.	Kasubbid Pendapatn Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan	1	Pejabat Pengawas

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Susunan ASN berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
1	2	3	4
1.	IV/c	S-2	1
2.	IV/a	S-1	3
3.	III/d	S-2	1
4.	III/d	S-1	2
5.	III/c	S-2	2
6.	III/c	S-1	4
7.	III/c	D-3	1
8.	III/b	S-1	2

No.	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
9.	III/a	S-1	4
10.	III/a	D-3	2
11.	II/d	D-3	1
12.	II/d	SLTA	1
13.	I/d	SLTP	1
14.	IX	S-1	1
Total			28

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan Non ASN

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pranata Komputer Muda	1	JFT
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	2	JFT
3.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	JFT PPPK
4.	Bendahara Pengeluaran	1	Pelaksana
5.	Pengelola Keuangan	-	Pelaksana
6.	Verifikator Keuangan	-	Pelaksana
7.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	Pelaksana
8.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	Pelaksana
9.	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	3	Pelaksana
10.	Analisis Pajak	1	Pelaksana
11.	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	1	Pelaksana
12.	Pengelola Pendapatan	1	Pelaksana
13.	Pengadministrasi Umum	1	Pelaksana
14.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	Pelaksana
15.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	15	Non ASN
Total		30	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pada APBD Murni 2024, Bapenda memiliki Anggaran Belanja sebesar Rp. 13.731.233.689,- yang terdiri dari Rp. 10.742.067.445,- pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Rp. 2.989.166.244,- pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Anggaran Pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 51.763.471.920,-.

Pada APBD Perubahan 2024, Anggaran Belanja meningkat sebesar Rp. 643.458.471,- menjadi Rp. 14.374.692.160,- dimana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 11.558.706.652,- dan Program

Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.815.985.508,-. Anggaran Pendapatan pun meningkat Rp. 1.364.153.080,- menjadi Rp. 53.127.625.000,-

Sarana dan Prasarana di Badan Pendapatan Daerah untuk menunjang proses bisnisnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2024

No.	Nama Barang	Volume	Nilai
A	Komputer	128	965.415.231,31
1.	P.C Unit	41	1.421.460,461,31
2.	Lap Top	17	273.847.140
3.	Note Book	3	31.648.333,33
4.	Hard Disk	1	9.900.000
5.	Monitor	5	7.675.000
6.	Printer	40	434.131.089,48
7.	Scanner	9	97.605.000
8.	External/ Portable Hardisk	1	1.320.000
9.	Server	2	85.675.000
10.	Router	6	26.870.000
11.	Hub	1	2.816.000
12.	Wireless Access Point	2	1.980.000
B	Alat Angkutan	16	804.113.741,18
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	3	627.550.000
	Sepeda Motor	13	176.563.741,18
C	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5	21.394.444,44
	Mesin Gerinda	1	950.000
	Peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	4.975.000
	Global Positioning System	2	14.519.444,44
	Termometer Standar	1	950.000
D	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	242	783.243.896,08
	Lemari Besi/Metal	12	36.113.000
	Lemari Kayu	2	1.881.000
	Rak Besi	24	56.531.000
	Filing Cabinet Besi	15	33.100.000
	Locker	2	4.100.000
	Lemari Kaca	3	4.350.000
	CCTV	1	28.000.000
	Mesin Antrian	1	108.558.000
	Alat Kantor Lainnya	1	1.408.000
	Meja Kerja Kayu	63	44.122.592,75
	Kursi Besi/Metal	3	3.680.000
	Meja Rapat	1	11.172.000
	Kursi Rapat	42	73.195.800
	Kursi Tamu	2	7.702.800
	Kursi Putar	1	639.375
	Kursi Biasa	1	3.200.000
	Bangku Tunggu	8	34.187.000

No.	Nama Barang	Volume	Nilai
	Sofa	3	35.325.000
	Lemari Es	2	6.036.125
	A.C. Split	14	80.734.933,33
	Kipas Angin	3	1.500.000
	Alat Pendingin Lainnya	3	84.400.000
	Treng Air/Tandon Air	1	1.705.000
	Televisi	2	60.000.000
	Tangga Aluminium	1	1.965.000
	Dispenser	5	8.157.270
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	7.900.000
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	20.380.000
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	10.200.000
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5	13.000.000
E	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	7	182.384.000
	Microphone/Wireless MIC	1	6.500.000
	Layar Film/Projector	1	6.300.000
	Camera Conference	1	16.500.000
	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	2	96.950.000
	Genset	2	56.134.000
F	Alat Laboratorium	13	73.200.000
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	13	73.200.000

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Nomor 700.1.2.1/54/LHE AKIP – Irban IV/Insp/2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menunjukkan perolehan Nilai SAKIP Bapenda pada angka 81,50 dengan predikat Memuaskan (A). Ada 4 Komponen yang dinilai pada Evaluasi AKIP, dan Bapenda mendapatkan saran yang harus ditindaklanjuti untuk memperbaiki nilai SAKIP untuk tahun 2024 ini. Adapun saran dari Hasil Evaluasi SAKIP 2023 yang sudah ditindak lanjuti oleh Bapenda pada tahun 2024 ini yaitu :

Tabel 1.5
Tabel Matriks Tindaklanjut LHE SAKIP 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja	
1.	Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	Menyusun Rencana Kerja 2024 dengan mempertimbangkan Laporan Kinerja tahun 2022 serta Laporan Monev TW 1 – 2 2023
2.	Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan	Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan serta

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) yang jelas	Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan (Tindak Lanjut untuk Pengukuran Kinerja) serta feedback pimpinan akan dicatat dalam notulen Rapat
3.	Dokumen perencanaan kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja	Renja 2024 dan Perjanjian Kinerja tetap diselaraskan dengan Renstra 2024-2026, serta dilakukan evaluasi per triwulan
B. Pengukuran Kinerja		
1.	Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/ terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala	Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan dan membuat Laporannya
2.	Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan dan Laporannya sebagai pertimbangan Perubahan Target Renja
3.	Agar ditetapkan mekanisme atau kriteria yang jelas tentang pemberian reward dan punishment atas pencapaian kinerja	Membuat SK Tim Penilai untuk Reward dan Punishment ASN di Bapenda
4.	Dalam penilaian SKP bulanan agar pimpinan memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) yang berkelanjutan	Memberikan Umpan Balik pada Penilaian SKP dengan memberi “tanda jempol” sesuai dengan bawaan aplikasi E-Kinerja BKN
C. Pelaporan Kinerja		
1.	Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan
2.	Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Mempertimbangkan Laporan Kinerja 2023 dalam perubahan target Renja Perubahan 2024
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi sakuntala	Membuat Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan Menguploadnya di Sakuntala
2.	Membuat pohon kinerja sebagai dasar untuk menyusun perencanaan	Membuat Pohon Kinerja berdasarkan saran KemenpanRB dan pertimbangan Kepala Badan

Sumber : LHE SAKIP 2023 Bapenda dan Sub Bagian Perencanaan Bapenda

I. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Tujuan, Sasaran Kabupaten
- B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPD
 - 2. Eselon II
 - 3. Eselon III
 - 4. Eselon IV
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023-2024

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

Salah satu **Tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut** adalah “**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**” dengan Indikatornya “**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**”. Tujuan dan Indikator ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 6, IPKD diukur melalui 6 dimensi, dimana 6 dimensi ini melibatkan seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Salah satu dimensi IPKD, yakni “Kondisi Keuangan Daerah” di dalamnya ada indikator “Kemandirian Keuangan”, dijadikan sebagai **Sasaran RPD Kabupaten**, yakni “**Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah**” dengan **Indikatornya “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**”. Sasaran ini dilaksanakan oleh SKPD, BLUD, ataupun UPT yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi Koordinator.

Tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut lainnya “**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**” dengan **indikator “Indeks Reformasi Birokrasi**”. Tujuan dan Indikator ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi tepat 8 Area Perubahan, dimana salah satu areanya adalah “Akuntabilitas Kinerja”, sehingga “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” menjadi **Sasaran RPD Kabupaten**. **Indikator** Sasaran ini, yakni “**Nilai SAKIP Kabupaten**” sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Ada 2 Tujuan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diambil dari Sasaran RPD Kabupaten, dimana Sasaran ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Pendapatan Daerah. Pertama adalah “**Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah**” dengan Indikator “**Rasio Kemandirian Keuangan**”

Daerah”, dan Kedua adalah “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” dengan Indikator “**Nilai SAKIP Kabupaten**”.

Tabel 2.1
Tujuan Badan Pendapatan Daerah

No.	Tujuan Bapenda	Indikator	Cara Hitung
1.	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	LHE AKIP dari Kemenpan-RB

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

Adapun Sasaran beserta Indikator yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang tercantum di Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 pada aplikasi esakip.tanahlautkab.go.id, yaitu:

- **Sasaran Strategis (IKU Badan Pendapatan Daerah)**

- 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah harus didukung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mewujudkan itu, maka Sasaran Strategisnya adalah “**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**” dengan indikator “**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**”.

- 2. Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus didukung dengan peningkatan Akuntabilitas yang ada di SKPD. Untuk mewujudkan itu, maka Sasaran Strategisnya adalah “**Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda**” dengan indikator “**Nilai AKIP Bapenda**”.

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diemban oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

Tabel 2.2
Tabel Sasaran Strategis dan IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD tahun berkenaan (n)} - \text{Jumlah PAD tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah PAD tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai AKIP Bapenda	LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

- **Sasaran Program**

Sasaran Program ini diemban oleh Eselon III (Pejabat Administrator). Sasaran Program ini untuk mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana unsur PAD berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2023 serta untuk mewujudkan Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda sebagaimana area “Akuntabilitas Kinerja” pada Permenpan-RB Nomor. 26 Tahun 2020 adapun Sasaran Programnya, yaitu:

Tabel 2.3

Sasaran Program Eselon III (Pejabat Administrator)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan.
2.	Meningkatnya Pembinaan PAD	Jumlah PAD	Jumlah PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai dari Komponen Perencanaan di LHE AKIP dari Penilaian Inspektorat	Sekretaris
4.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	Nilai dari Komponen Pengukuran di LHE AKIP dari Penilaian Inspektorat	Sekretaris
5.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	Nilai dari Komponen Pelaporan di LHE AKIP dari Penilaian Inspektorat	Sekretaris
6.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai dari Komponen Evaluasi Internal di LHE AKIP dari Penilaian Inspektorat	Sekretaris
7.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Hasil Pengolahan Kuisioner	Sekretaris

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

- **Sasaran Kegiatan**

Tabel 2.4

Sasaran Kegiatan Eselon IV (Pejabat Pengawas) dan PPTK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Hitung	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	%Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	(Jumlah Wajib Pajak yang Taat Membayar÷Jumlah Wajib Pajak)*100	Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan.
2.	Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah	% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	((Realisasi PJBT Makan Minum, PJBT Tenaga Listrik, MBLB, Pajak Air Tanah)÷(Target PJBT Makan Minum, PJBT Tenaga Listrik, MBLB, Pajak Air Tanah))*100	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
3.	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	Jumlah OPD Penghasil PAD yang Menyepakati Target PAD÷Jumlah OPD Penghasil PAD*100	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
4.	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD	% Realiasi PAD terhadap Target yang Disepakati	(Realisasi PAD÷Target PAD)*100	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
5.	Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	(Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan/Target Dokumen Perencanaan)*100	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6.	Menciptakan Pelayanan Adminitrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.	Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	(Realisasi dari Sub Kegiatan/Target Sub Kegiatan)*100	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Hitung	Penanggung Jawab
8.	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9.	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Hasil Pengolahan Kuisisioner	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10.	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11.	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 menyesuaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Perubahan Tahun 2024, dimana telah tergambar target kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran. Sasaran Strategis/SKPD/OPD menjadi Kinerja Utama Eselon II, Sasaran Program menjadi Kinerja Utama Eselon III, dan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan menjadi Kinerja Utama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun rincian Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	1,31%
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai AKIP Bapenda	81

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sasaran Program Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, dan Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp 53.010.000.000

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Sasaran Program Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pembinaan PAD	Jumlah PAD	Rp 214.600.706.083

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Sasaran Program Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24
Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24
Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan PPTK Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah	% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan PPTK
Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan PPTK Kepala Bidang
Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	% Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	25 %

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan PPTK Kepala Bidang
Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen
Terlaksananya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan PPTK Kepala Bidang
Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	100%
Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD	% Realiasi PAD terhadap Target yang Disepakati	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan PPTK Kepala Bidang
Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Rencana Pengelolaan PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan PAD	2 Dokumen
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PAD	Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	2 Laporan

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.15
Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan PPTK Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%
Menciptakan Pelayanan Adminitrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.16
Perjanjian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan PPTK Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.17
Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan PPTK Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%
Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3
Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3
Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3
Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.18
Perjanjian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan PPTK Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	4 Orang
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	9 Unit
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Untuk mendukung Capaian Kinerja, Badan Pendapatan Daerah membuat kebijakan untuk memberikan *reward* kepada pemungut pajak hotel dan rumah makan, serta juga *reward* kepada konsumen hotel dan rumah makan dengan menggunakan metode undian. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah mengandalkan aplikasi Citigov dan Smartgov dalam pencatatan transaksi Pajak Daerah, monitoring penggunaan tapping box pada pemungut PBJT Hotel dan Rumah Makan, serta memaksimalkan SIPD-RI dalam proses bisnisnya.

Tabel 2.19
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Anggaran Pendukung Capaian Kinerja

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.558.706.652
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.940.425
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.006.834
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.933.591
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.466.375.130
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.464.982.754
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.392.376
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.989.100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.989.100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.958.982.740
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.180
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	597.675.009
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.358.082
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.996.926
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.293.189.762
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.766.781
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	434.425.037
	Pengadaan Mebel	149.858.637
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	284.566.400
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.786.220
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.620.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.166.220
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.208.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.260.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.409.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.539.000
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.815.985.508
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.815.985.508
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	57.608.008
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	140.048.777

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	370.478.656
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	34.754.387
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	440.608.521
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	413.531.481
	Penagihan Pajak Daerah	1.146.315.589
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	117.895.089
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	94.745.000

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi Kinerja Utama Kepala Badan (Eselon II) memiliki 2 Sasaran dengan masing-masing 1 Indikator. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Badan memiliki 28 orang ASN dan 15 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan anggaran Rp 14.374.692.160, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 13.276.045.267 (92,36%). Dasar perhitungan Indikator ini masih menggunakan LRA Kabupaten Tanah Laut 2024 dan 3 LRA dari Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan yang belum diaudit BPK, serta LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Berikut ini realisasi dari target Kepala Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 :

Tabel 3.1
Target, Realisasi, dan Capaian IKU 2021-2024

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024			Target Akhir Resntra	Capaian Tahun 2024 THD Target Akhir Renstra
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	8,70	-5,94	9,20	1,31	11,99	915,27%	3,88	309,02%
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai AKIP Bapenda	83,11	77,2	79,25	81	81,5	100,62%	83	98,19%

Sumber : LRA 2021-2024 Kabupaten Tanah Laut dan LHE AKIP 2021-2024 dari Inspektorat

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tanah Laut dengan 3 Kabupaten Lainnya Tahun 2024

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Tanah Laut	Banjar	Tabalong	Hulu Sungai Utara
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	11,99	43,37	-0,09	-5,67
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai AKIP Bapenda	81,50	81,14	80,36	77,50

Sumber : LRA 2024 per Kabupaten yang belum diaudit (didownload 2 Januari 2025) dan LHE Sakip Bapenda Penilaian Masing-masing Inspektorat Kabupaten.

a. Sasaran 1 (Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah)

Tabel 3.3
Cara Hitung Indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD tahun berkenaan (n)} - \text{Jumlah PAD tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah PAD tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

Perhitungan Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi PAD 2024} & : \text{Rp } 237.117.672.235,38 \\ \text{Realisasi PAD 2023} & : \text{Rp } 211.724.647.374,28 \\ \text{Realisasi 2023} & = \frac{(237.117.672.235,38 - 211.724.647.374,28)}{211.724.647.374,28} \times 100 \\ & = 11,99\% \end{aligned}$$

Tabel 3.4
Capaian Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	4,12	-5,94	-144,19	6,20	9,20	148,38	1,31	11,99	915,27%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2024										915,27%

Sumber : LRA 2022-2024 Kab. Tanah Laut dihitung Sub Bagian Perencanaan & Keuangan

Tabel 3.5
Capaian Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 2024 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	1,31	11,99	915,27%	3,88	309,02

Sumber : LRA 2022-2024 Kab. Tanah Laut dihitung Sub Bagian Perencanaan & Keuangan

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 meningkat sebesar 11,99% dari Tahun 2023, dimana ini di atas target Perjanjian Kinerja Perubahan 2023. Realisasi tahun 2024 ini di atas target akhir Renstra RPD dimana targetnya 3,88%. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 ini di luar prediksi, dimana target peningkatan diprediksi 1,31% dari PAD tahun 2023, atau target APBD-P 2024 sebesar Rp 214.600.706.083,00, namun realisasi PAD terhadap target APBD-P 2024 sebesar Rp 237.117.672.235,38 atau 110,49%. Hal ini lah yang menyebabkan kenaikan yang sangat tinggi daripada target / prediksi. 3 Sumber PAD yang mendukung Pertumbuhan PAD, yakni Pajak Daerah meningkat 2,89%,

Retribusi Daerah 1065,21%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22,67%. Hanya pada sumber Lain-lain PAD yang Sah menurun di -43,55%. Retribusi meningkat drastis karena Pendapatan BLUD yang ada di Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2023, masuk ke Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,99% atau dengan Rasio Kemandirian Fiskal 9,16% ini turut mendukung Kabupaten Tanah laut dalam meraih Penganugerahan APBD AWARD pada kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kabupaten Tanah Laut berada di posisi ke-3 dari 5 Kabupaten Terbaik.

Gambar 3.1
Penganugerahan APBD AWARD



Sumber : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah laut

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat menggunakan Citigov, dan internal Bapenda dengan Smartgov .
2. Kerjasama dgn APH (Kejaksaan) dalam penagihan piutang pajak daerah.
3. Meningkatkan pengawasan perpajakan bersama dengan Satpol-PP
4. Penyesuaian kembali Satu Kelas NJOP di tahun 2024 dibanding tahun 2023.

5. Selalu melakukan Rapat Koordinasi per triwulan dan Kunjungan pada waktu tertentu ke SKPD pengasil Pendapatan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.
6. Pemberian *reward* kepada pemungut pajak Restoran dan Hotel dengan Hadiah Utama Sepeda Motor, dan hadiah lainnya untuk konsumen (wajib pajak daerah) dari Restoran dan Hotel yang menggunakan *tapping box*.
7. SKPD Penghasil Retribusi, dan Rumah Sakit dan Puskesmas mulai menggunakan QRIS dari Bank Kalsel (Bank RKUD)

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2024 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Banyak Wajib Pajak Daerah yang tidak menggunakan Bank Kalsel (Bank RKUD) sehingga dapat mengurungkan niat Wajib Pajak Daerah membayar, serta dalam pencatatan transaksi tidak terekam karena bukan transfer dari Bank RKUD.
2. NJOP sudah naik 3 Kelas (Pada 2023 sebanyak 2 kelas, dan 2024 sebanyak 1 Kelas), namun Harga per Meter belum pernah ada penyesuaian selama 13 Tahun terakhir.
3. Aplikasi Citigov yang masih kurang diketahui oleh Wajib Pajak Daerah
4. Masih ada Wajib Pajak yang membayar kewajibannya tidak tepat waktu
5. Realisasi PAD selalu berpotensi tidak maksimal atau tidak sesuai target APBD
6. Reward Hadiah Sepeda Motor berhasil membuat realisasi PBJT Rumah Makan meningkat 200.000.000 Rupiah, sehingga perlu memberi reward pada Pajak yang lain

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk perbaikan kinerja, yaitu :

1. Menjalankan Digitalisasi (Transaksi Non Tunai) hasil kerjasama dengan Bank Kalsel, dan Bank Mandiri dalam transaksi Pajak Daerah.
2. Melakukan penyesuaian harga per meter di NJOP dalam PBB-P2 karena selama 13 tahun belum diadakan penyesuaian.
3. *Rebranding* aplikasi Citigov dengan sebutan “Bepadah Bungas Tu Pang” agar menjadi atensi Wajib Pajak Daerah.
4. Melanjutkan kerjasama dengan APH (Kejaksanaan) dalam penagihan piutang pajak daerah serta pengawasan perpajakan bersama dengan Satpol-PP

5. Melanjutkan pengendalian dan pengawasan pada retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang Sah melalui kunjungan dan rapat koordinasi;
6. Memberikan Reward 3 Buah Sepeda Motor dengan cara undian kepada masing-masing Wajib PBB-P2, Konsumen (Wajib Pajak) pada Rumah Makan/Restoran dan Hotel yang menggunakan Tapping Box, dan Pemungut Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel yang menggunakan Tapping Box
7. Melalui BPKAD dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal di tahun 2025 sebesar 50 Milyar agar mendapatkan dividen di tahun 2026.
8. Melalui BPKAD, kembali mendepositokan Saldo APBD yang belum digunakan.

Tabel 3.6
Tabel Perbandingan Realisasi PAD Kab. Tanah Laut
dengan 3 Kabupaten Lain

Kabupaten	Realisasi		Pertumbuhan PAD 2024
	2023	2024	
Tanah Laut	211.724.647.374,28	237.117.672.235,38	11,99%
Banjar	277.941.575.026,04	398.490.299.484,93	43,37%
Tabalong	256.804.852.375,79	233.013.948.381,38	-0,09%
Hulu Sungai Utara	153.400.781.918,22	144.704.497.750,42	-5,67%

Sumber : LRA 2024 per Kabupaten yang belum diaudit (didownload 2 Januari 2025)

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain, berdasarkan LRA sementara yang didownload tanggal 2 Januari 2025, Kabupaten Tanah Laut tertinggi dalam Pertumbuhan PAD dengan 11,99%, sedangkan 3 Kabupaten lain mengalami penurunan, seperti Kabupaten Tabalong menurun 0,09%, dan Hulu Sungai Utara menurun 5,67%. Namun jika dilihat jumlah Rupiah, Realisasi Kab. Tanah Laut dan Tabalong pada tahun 2024 nilainya berdekatan, yakni di kisaran Rp 230 Milyar. Jika melihat ke tahun 2023, Realisasi PAD Banjar sangat tinggi. Penurunan Realisasi PAD Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 disebabkan menurunnya kombinasi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sedangkan peningkatan PAD drastis dari Banjar disebabkan peningkatan yang ada pada Lain-Lain PAD yang Sah. Masih ada kemungkinan nilai Pertumbuhan PAD berubah setelah rampungnya penginputan Pendapatan dan dilakukan Audit.

b. Sasaran 2 (Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda)

Tabel 3.7
Cara Hitung Indikator Nilai AKIP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai AKIP Bapenda	LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

Tabel 3.8
Capaian Nilai AKIP Bapenda

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai AKIP Bapenda	Nilai	77 (BB)	77,2 (BB)	100,26%	78 (BB)	79,25 (BB)	101,60%	81 (A)	81,50 (A)	100,62%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										100,62%

Sumber : LHE AKIP Bapenda 2022-2024 dari Inspektorat Kab. Tanah laut

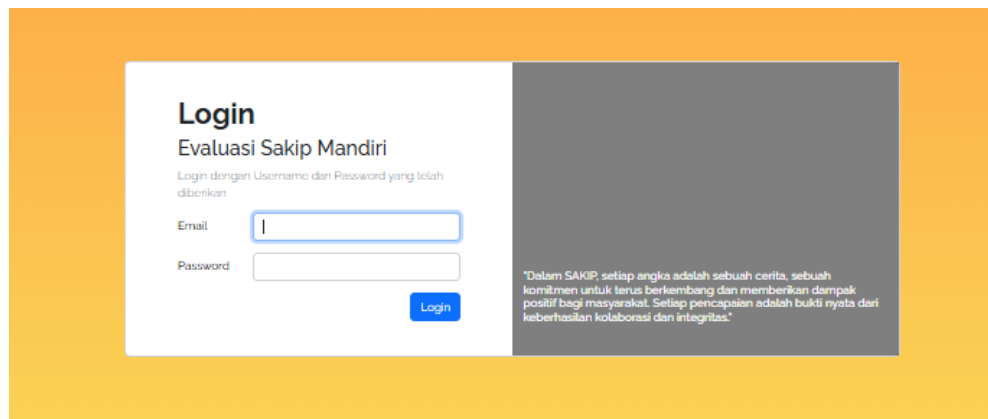
Tabel 3.9
Capaian Nilai AKIP 2024 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Nilai AKIP Bapenda	Nilai	81 (A)	81,50 (A)	100,62%	83	98,19%

Sumber : LHE AKIP Bapenda 2024 dari Inspektorat Kab. Tanah laut

Nilai Evaluasi SAKIP 2024 atas kinerja tahun 2023 mendapatkan nilai 81,5 (A), lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 79,25 (BB). Rincian pada komponen Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 24,60, Pengukuran Kinerja 24,60, Pelaporan Kinerja 12,30 dan Evaluasi Akuntabilitas Internal 20,00. Ini adalah kali pertama Bapenda meraih nilai A pada penilaian berbasis IT setelah terakhir mendapatkan nilai A pada tahun 2021 dengan penilaian secara manual.

Gambar 3.2
Website Penilaian Evaluasi Sakip Mandiri



Sumber : <https://sakuntala.tanahlautkab.go.id/>

Badan Pendapatan Daerah berhasil menerima penghargaan sebagai SKPD dengan Kinerja Terbaik II di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Kerja Keras dari seluruh tim di Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target serta inovasi mengantarkan Bapenda pada prestasi ini, setelah tahun sebelumnya berada di papan bawah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Gambar 3.3
Penghargaan Kinerja Terbaik II



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk keberhasilan realisasi indikator pada tahun 2024 ini, yaitu :

- 1) Membuat monev untuk Eselon II (Pajabat Pimpinan Tinggi Pratama), III (Pejabat Administrator), dan IV (Pejabat Pengawas)
- 2) Mempertahankan perencanaan kinerja yang sudah selaras
- 3) Menunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja agar menjamin keandalan data kinerja
- 4) Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi APIP
- 5) Mempersiapkan data-data yang diperlukan pada penilaian AKIP pada website Sakuntala.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi untuk keberhasilan pada selama tahun 2024 pada indikator ini, yaitu:

- 1) Adanya perubahan Pohon Kinerja pada pertengahan tahun 2024 menyesuaikan saran Kemenpan-RB
- 2) Adanya aplikasi terbaru, yakni website esakip.tanahlaut.go.id hasil kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 3) Masih adanya kekurangan pada Laporan Kinerja dimana paling tidak membandingkan IKU dengan 3 Kabupaten berdasarkan saran Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- 4) Masih adanya saran untuk mempertimbangkan Laporan Kinerja tahun sebelumnya untuk membuat Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, namun Indikator Kinerja Utama, yakni Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga harus mempertimbangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD tahun sebelumnya dengan target Pendapatan Asli Daerah tahun yang dinilai.

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu :

- 1) Mempertahankan Pohon Kinerja sesuai saran Kemenpan-RB, dan memperhatikan perubahan SOTK pada tahun 2025
- 2) Menggunakan website esakip.tanahlaut.go.id untuk mendukung dan mempermudah penilaian AKIP
- 3) Meminta bantuan Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda, dan Pelaporan untuk memperoleh LRA dari 3 Kabupaten lain sehingga dapat membandingkan Realisasi IKU Eselon II.
- 4) Menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan dengan mempertimbangkan Laporan Kinerja tahun Sebelumnya serta Target PAD pada APBD Perubahan.

Tabel 3.10
Tabel Perbandingan Nilai AKIP Bapenda per Kabupaten berdasarkan Penilaian Inspektorat masing-masing Kabupaten tahun 2024

Kabupaten	Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi Internal	Realisasi 2024	Kategori
Tanah Laut	24,60	24,60	12,30	20,00	81,50	A
Banjar	24,58	23,49	12,38	20,70	81,14	A
Tabalong	25,90	26,23	10,65	17,58	80,36	A
Hulu Sungai Utara	24,00	24,00	12,00	17,50	77,50	BB

Sumber : LHE Penilaian Inspektorat masing-masing Kabupaten

Jika dilihat dari perbandingan dengan Bapenda dari Kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Bapenda Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai tertinggi. Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal yang dilakukan Bapenda Kabupaten Tanah Laut unggul pada Nilai Komponen Pelaporan dan Evaluasi Internal dengan nilai 12,30, dan 20 jika dibandingkan dengan Bapenda Kab. Tabalong dan Bapenda Kab. Hulu Sungai Utara. Apabila dibandingkan dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab Banjar, Bapenda Kab. Tanah Laut unggul di

Komponen Perencanaan dan Pengukuran. Komponen dan Pengukuran di Bapenda Kab. Tanah Laut sudah mengikuti arahan Bappeda Kab. Tanah Laut. Sedangkan Komponen Pelaporan, Laporan Kinerja Bapenda sudah mengikuti arahan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Pada Komponen Evaluasi Internal, Bapenda Kab. Tanah Laut sudah mengikuti arahan Inspektorat Kab. Tanah Laut dengan memaksimalkan penggunaan website Sakuntala.

2. Eselon III (Pejabat Administrator)

a. Sasaran Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan (P3)

Tabel 3.11
Cara Hitung Indikator Jumlah Pajak Daerah

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Rp 54.191.657.384,00

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan Tahun 2024

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp 53.010.000.000	Rp. 54.191.657.384	102,23%

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2024

Tabel 3.13
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Pajak Daerah		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2021	41.615.000.000,00	43.638.422.656,00	104,86
2022	41.000.250.000,00	45.363.440.225,80	110,64
2023	49.300.000.000,00	52.667.553.207,68	106,83
2024	53.010.000.000,00	54.191.657.384,00	102,23

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2021-2024

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid P3 Tahun 2024
Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Jumlah Pajak Daerah	Rp	53.010.000.000	54.191.657.384	102,23%	86.564.782.504,87	62,60%

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2021-2024

Tabel 3.15
Cara Hitung Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

SASARAN Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	% Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	(Jumlah Wajib Pajak yang Taat Membayar÷Jumlah Wajib Pajak)*100% (133.699 ÷ 67.392)*100% = 50,77%

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

Tabel 3.16
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan Tahun 2024

Tahun	% Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban		
	Target %	Realisasi %	Capaian (%)
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	25	50,77	203,08

Sumber : Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kabid P3 Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
% Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	%	25	50,77	203,08	27	188,04

Sumber : Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang diolah Sub Bagian Perencanaan

Tabel 3.18
Realisasi Sasaran Sub Kegiatan PPTK Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan Tahun 2024

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Terlaksananya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Program yang menjadi Kinerja Utama Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan adalah Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, sedangkan Sasaran Kegiatan yang menjadi Kinerja Utamanya adalah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang P3 memiliki 2 Kepala Sub Bidang, 1 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), 4 Jabatan Fungsional Umum (JFU), 2 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan anggaran Rp 1.264.210.678,

dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.206.097.300 (95,40%), dengan 1 Program, 1 Kegiatan, dan 2 Sub Kegiatan.

Tabel 3.19
Realisasi Peningkatan Pajak Daerah 2024

Ide	Pajak Daerah	Realisasi Peningkatan
1.	PBJT Perhotelan	3,33%
2.	PBJT Makan Minum	20,15%
3.	PBJT Kesenian dan Hiburan	14,72%
4.	PBJT Listrik	0,61%
5.	PBJT Parkir	4,71%
6.	Air Tanah	28,93%
7.	Reklame	27,28%
8.	Sarang Walet	-0,60%
9.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	44,19%
10.	PBB-P2	22,48%
11.	BPHTB	-34,64%

Sumber : LRA 2023-2024 perhitungan Sub Bagian Perencanaan

Realisasi Indikator dari Sasaran Program Kabid P3, yakni Jumlah Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp 54.191.657.384 melampaui target APBP-P Rp 53.010.000.000 atau dengan Capaian 102,23%. Realisasi Pajak Daerah selalu meningkat dari tahun 2022-2024 walaupun angka peningkatannya bervariasi, yakni pada tahun 2022 sebesar 3,95%, 2023 sebesar 16,10%, dan 2024 sebesar 2,89%. Capaian 102,23% ini didukung 9 Pajak Daerah yang mengalami Peningkatan dibanding tahun 2023, dimana 3 Pajak Daerah Paling Dominan meningkat, yakni PBB-P2 sebesar Rp 1,3 Milyar (22,48%), PBJT Makan Minum Rp 1,35 Milyar (20,15%), dan MBLB Rp 1,2 Milyar (44,19%). Hanya BPHTB yang menurun Rp 3 Milyar (34,64%), dan Pajak Sarang Walet Rp 472 Juta (0,6%). Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra, maka Capaiannya masih diangka 62,60%, sehingga masih banyak yang harus diperhatikan untuk meningkatkan realiasi Jumlah Pajak Derah.

Jika dilihat dari Indikator dari Sasaran Kegiatan Kabid P3, Yakni Persentase Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban, dengan target 25%, realisasi kepatuhan pada angka 50,77%. Hal ini disebabkan dominannya SPPT PBB-P2 dengan jumlah 133.699 lembar hanya tertagih 67.391 lembar atau 50,41%. Sedangkan Pajak Daerah lainnya di atas 80%.

Upaya yang sudah dilakukan Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan pada tahun 2024 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu

- 1) Pemberian reward kepada pemungut pajak Restoran dan Hotel dengan Hadiah Utama Sepeda Motor, dan hadiah lainnya untuk konsumen (wajib pajak daerah) dari Restoran dan Hotel yang menggunakan tapping box.
- 2) Kerjasama dengan APH (Kejaksaan) dalam penagihan piutang PBB-P2.
- 3) Setiap Desa memiliki Koordinator Kolektor dan Kolektor PBB-P2, sehingga mempercepat proses koordinasi dalam penagihan.
- 4) SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya yang berhasil ditagih oleh Kolektor diberikan imbalan/honor, tidak seperti ditahun 2023 yang hanya memberi honor pada tahun berjalan.
- 5) Menyurati SKPD-SKPD dan Kantor Desa untuk segera membayar pajak catering diakhir tahun atas kegiatan yang melibatkan makan dan minum.
- 6) Adanya kebijakan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Surat Edaran, dimana pembelian bahan-bahan MBLB dari pihak ketiga harus ke Penambang Berizin agar Pajak MBLB dapat meningkat.
- 7) Monitoring Rumah Makan yang menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) yang terhubung dengan jaringan di aplikasi pada setiap hari kerja serta melakukan konfirmasi ke Pihak Rumah Makan.
- 8) Meningkatkan pengawasan bersama dengan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pajak Hotel, Rumah Makan, Retoran, MBLB, Walet, PBB-P2 dan Hiburan (Bapenda, DPMPTSP, Satpol-PP dan Damkar) dengan kunjungan langsung.

Gambar 3.4
Pemberian Hadiah Utama atas Reward Pajak Makan dan/atau Minum



Sumber : Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2024 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu

- 1) *Reward* untuk Pemungut dan Konsumen PBJT Hotel dan Rumah Makan yang menggunakan tapping box berhasil menaikkan penerimaan, namun dapat mengurangi minat Wajib Pajak untuk membayar Pajak yang Lain.
- 2) Masih terdapat Wajib PBB-P2 yang lambat melakukan pembayaran.
- 3) Beradaptasi dengan adanya Koordinator Desa, dimana tahun 2023 Koordinator masih di Kecamatan.
- 4) Motivasi Kolektor dalam melakukan penagihan PBB-P2 harus tetap dijaga
- 5) SKPD-SKPD dan Kantor Desa pada akhir tahun biasanya terlambat dalam membayar PBJT Catering atas kegiatan yang melibatkan makan dan minum
- 6) Pihak Ketiga dalam melakukan pembelian bahan-bahan MBLB masih ada kemungkinan membeli dengan penambang tak berizin, sehingga tidak ada pencatatan dari penambang tidak berizin sebagai dasar penarikan Pajak MBLB.
- 7) Pemungut PBJT Rumah Makan biasanya pasif dalam penggunaan alat perekam transaksi, baik itu tidak menggunakan atau tidak melapor saat alat rusak atau sedang libur.
- 8) Perlunya mejaga kepatuhan Wajib PBJT Hotel, Rumah Makan/Retoran, MBLB, Walet, PBB-P2 dan Hiburan.

Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Memberikan tambahan Reward, yakni 3 Buah Sepeda Motor dengan cara undian kepada masing-masing Wajib PBB-P2, Konsumen (Wajib Pajak) pada Rumah Makan/Restoran dan Hotel yang menggunakan Tapping Box, dan Pemungut Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel yang menggunakan Tapping Box
- 2) Melanjutkan kerjasama dengan APH (Kejaksaan) dalam penagihan PBB-P2
- 3) Melanjutkan pekerjaan dengan Koordinator Kolektor dan Kolektor PBB-P2, sehingga mempercepat proses koordinasi dalam penagihan.
- 4) Melanjutkan pemberian honor kepada Kolektor atas SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya yang berhasil ditagih.

- 5) Melanjutkan untuk menyurati SKPD-SKPD dan Kantor Desa untuk segera membayar pajak catering diakhir tahun 2025 atas kegiatan yang melibatkan makan dan minum.
- 6) Melanjutkan kebijakan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Surat Edaran, dimana pembelian bahan-bahan MBLB dari pihak ketiga harus ke Penambang Berizin agar Pajak MBLB dapat meningkat.
- 7) Melanjutkan monitoring Rumah Makan yang menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) yang terhubung dengan jaringan di aplikasi pada setiap hari kerja serta melakukan konfirmasi ke pihak Rumah Makan.
- 8) Melanjutkan pengawasan bersama dengan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pajak Hotel, Rumah Makan, Retoran, MBLB, Walet, PBB-P2 dan Hiburan (Bapenda, DPMPTSP, Satpol-PP dan Damkar) dengan kunjungan langsung.

b. Sasaran Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah (P2D)

Tabel 3.20
Cara Hitung Indikator Jumlah Pajak Daerah

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Rp 54.191.657.384,00

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2024

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp 53.010.000.000	Rp. 54.191.657.384	102,23%

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2024

Tabel 3.22
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Pajak Daerah		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2021	41.615.000.000,00	43.638.422.656,00	104,86
2022	41.000.250.000,00	45.363.440.225,80	110,64
2023	49.300.000.000,00	52.667.553.207,68	106,83
2024	53.010.000.000,00	54.191.657.384,00	102,23

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2021-2024

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid P2D Tahun 2024
Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Jumlah Pajak Daerah	Rp	53.010.000.000	54.191.657.384	102,23%	86.564.782.504,87	62,60%

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2024

Tabel 3.24
Cara Hitung Indikator Pajak dari Sektor Potensial

SASARAN Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah	% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	$\frac{(\text{Realisasi PJBT Makan Minum, PJBT Tenaga Listrik, MBLB, Pajak Air Tanah}) \div (\text{Target PJBT Makan Minum, PJBT Tenaga Listrik, MBLB, Pajak Air Tanah}) * 100}{(8.072.590.514 + 26.277.812.327 + 3.922.575.585 + 1.903.604.105) \div (7.500.000.000 + 26.025.000.000 + 3.000.000.000 + 1.700.000.000) * 100} = 32.103.992.017,00 \div 30.725.000.000,00 = 104,49\%$

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

Tabel 3.5
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kabid P2D
Tahun 2022-2024

Tahun	Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100	102,53	102,53
2022	100	106,76	106,76
2023	100	108,24	108,24
2024	100	104,49	104,49

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2022-2024

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kabid P2D Tahun 2024
Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	%	100	104,49	104,49	100	104,49

Sumber : Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang diolah Sub Bagian Perencanaan

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan Kabid P2D Tahun 2024

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%

LKj BAPENDA TAHUN 2024

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	7 Layanan	100%

Sumber : Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Sasaran Program yang menjadi Kinerja Utama Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah adalah Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah, sedangkan Sasaran Kegiatan yang menjadi Kinerja Utamanya adalah Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang P2D memiliki 2 Kepala Sub Bidang, 1 JFT, 2 JFU, dan 11 PTT dengan anggaran Rp 985.890.341,-, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 936.386.830,- (94,98%), dengan 1 Program, 1 Kegiatan, dan 4 Sub Kegiatan.

Realisasi Indikator dari Sasaran Program Kabid P3, yakni Jumlah Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp 54.191.657.384 melampaui target APBP-Perubahan Rp 53.010.000.000 atau dengan Capaian 102,23%. Realisasi Pajak Daerah selalu meningkat dari tahun 2022-2024 walaupun angka peningkatannya bervariasi, yakni pada tahun 2022 sebesar 3,95%, 2023 sebesar 16,10%, dan 2024 sebesar 2,89%. Capaian 102,23% ini didukung 9 Pajak Daerah yang mengalami Peningkatan dibanding tahun 2023, dimana 3 Pajak Daerah Paling Dominan meningkat, yakni PBB-P2 sebesar Rp 1,3 Milyar (22,48%), PBJT Makan Minum Rp 1,35 Milyar (20,15%), dan MBLB Rp 1,2 Milyar (44,19%). Hanya BPHTB yang menurun Rp 3 Milyar (34,64%), dan Pajak Sarang Walet Rp 472 Juta (0,6%). Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra, maka Capaiannya masih diangka 62,60%, sehingga masih banyak yang harus diperhatikan untuk meningkatkan realiasi Jumlah Pajak Daerah.

Jika dilihat dari Indikator dari Sasaran Kegiatan Kabid P2D, Yakni Persentase Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial, dengan target 100%, Realisasi Sektor Potensial pada angka 104,49%. Hal ini disebabkan 4 Pajak Sektor Potensial terealisasi lebih 100% dari target APBD-P 2024. Realisasi Pajak Air Tanah diangka 111,98%, PBJT Makan Minum 107,63%, PBJT

Tenaga Listrik 100,97%, dan MBLB 130,75%. Realisasi PBJT Makan Minum ini terbantu oleh program reward yang dilaksanakan oleh Bidang P3.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada tahun 2024 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu :

1. Penetapan dan cetak massal SPPT PBB-P2 dilakukan 29 Januari 2024 dan didistribusikan ke Desa/Kelurahan sampai bulan Maret 2024, dengan tanggal jatuh tempo 28 Juli 2024.
2. Penyesuaian kembali Satu Kelas NJOP di tahun 2024 dibanding tahun 2023.
3. Surat Edaran kepada ASN untuk segera melakukan pelunasan PBB-P2, dengan sanksi apabila diindahkan maka Tambahan Penghasilan Pegawai ditunda.
4. Sosialisasi ke 13 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut mengenai Perubahan Tarif Pajak
5. Perubahan tarif Pajak Reklame dari 15% menjadi 20% pada lahan pihak ketiga dan 25% pada lahan Pemda.
6. Pelaksanaan alat perekam transaksi (tapping box) pada 35 Rumah Makan
7. Perubahan tarif PAT sesuai Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 yang sebelumnya 15% menjadi 20%
8. Ketika melakukan pelayanan pajak daerah, menyaring Penetapan Pajak MBLB harus dari yang berizin.

Gambar 3.5

Penyerahan dan Pemasangan Tapping Box pada Salah Satu Rumah Makan



Sub Kegiatan : Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2024 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

1. Pecetakan dan cetak massal harus dipercepat agar pendistribusian SPPT PBB-P2 bisa cepat sampai ke tangan Wajib PBB-P2

2. Adanya keluhan kenaikan pembayaran dari Wajib PBB-P2 dikarenakan penyesuaian kembali NJOP 1 kelas, padahal harga per meter NJOP belum pernah disesuaikan selama 13 tahun
3. ASN Pemkab. Tanah Laut masih lamban dalam melakukan pembayaran PBB-P2, sedangkan ASN diharapkan menjadi contoh dalam ketaatan membayar PBB-P2
4. Adanya Perubahan Tarif Pajak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang belum diketahui masyarakat, dimana Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mengalami kenaikan.

Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

1. Penetapan dan cetak massal SPPT PBB-P2 akan dilakukan 31 Januari 2025 dan didistribusikan ke Desa/Kelurahan sampai bulan Maret 2025 dengan tanggal jatuh tempo 31 Juli 2025.
2. Melakukan penyesuaian harga per meter di NJOP dalam PBB-P2 karena selama 13 tahun belum diadakan penyesuaian.
3. Pendataan dan Updating PBB-P2 di Kawasan Perumahan berkoordinasi dengan DPRKPLH.
4. Kembali membuat Surat Edaran kepada ASN untuk segera melakukan pelunasan PBB-P2 dengan sanksi penundaan Tambahan Penghasilan Pegawai apabila diindahkan
5. Kembali melakukan sosialisasi ke Kecamatan mengenai Pajak Daerah
6. Tetap menyaring Penetapan Pajak MBLB harus dari yang berizin ketika melakukan Pelayanan Pajak Daerah

c. Sasaran Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

Tabel 3.28
Cara Hitung Indikator Jumlah PAD

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Pembinaan PAD	Jumlah PAD	Jumlah PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Rp 237.117.672.235,38

Sumber : <https://esakip.tanahlautkab.go.id/>

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan (PRP) Tahun 2024

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pembinaan PAD	Jumlah PAD	Rp 214.600.706.083	Rp. 237.117.672.235,38	110,49%

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2024

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid Pendapatan Lain-lain, Retda,
dan Pelaporan Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2021	167.212.726.505	206.135.630.696,00	123,28
2022	155.994.346.605	193.890.015.753,87	124,29
2023	215.796.462.766	211.724.647.374,28	98,11
2024	214.600.706.083	237.117.672.235,38	110,49

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2021-2024

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Program Kabid PRP Tahun 2024
Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Jumlah PAD	Rp	214.600.706.083	237.117.672.235,38	110,49%	239.527.881.285	98,99%

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2021-2024

Tabel 3.32
Cara Hitung Indikator Kegiatan Bidang PRP

SASARAN Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG
Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	(Jumlah OPD Penghasil PAD yang Menyepakati Target PAD ÷ Jumlah OPD Penghasil PAD) * 100
		$40 \div 40 * 100 = 100\%$
Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD	% Realisasi PAD terhadap Target yang Disepakati	(Realisasi PAD ÷ Target PAD) * 100
		$Rp\ 237.117.672.235,38 \div Rp\ 214.600.706.083,00 = 110,49\%$

Sumber : <https://eskip.tanahlautkab.go.id/>

Tabel 3.33
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan
Kabid PRP Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target			% Realisasi PAD terhadap Target yang Disepakati		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tahun	100	100	100	100	123,28	123,28
2021	100	100	100	100	123,28	123,28
2022	100	100	100	100	124,29	124,29
2023	100	100	100	100	98,11	98,11
2024	100	100	100	100	110,49	110,49

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2021-2024

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kabid PRP Tahun 2024
Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	%	100	100	100	100	100
% Realisasi PAD terhadap Target yang Disepakati	%	100	110,49	110,49	100	110,49

Sumber : LRA Kabupaten Tanah Laut 2024

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan Kabid PRP Tahun 2024

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Rencana Pengelolaan PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan PAD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PAD	Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	2 Laporan	2 Laporan	100%

Sumber : Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

Sasaran Program yang menjadi Kinerja Utama Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain, Retda, dan Pelaporan (PRP) adalah Meningkatnya Pembinaan PAD, sedangkan Sasaran Kegiatan yang menjadi Kinerja Utamanya adalah Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target, serta Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang PRP memiliki 2 Kepala Sub Bidang, 2 JFT, 2 JFU dengan anggaran Rp 565.884.489,-, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 551.302.000,- (97,42%), dengan 1 Program, 1 Kegiatan, dan 3 Sub Kegiatan.

Realisasi Indikator dari Sasaran Program Kabid PRP, yakni Jumlah PAD tahun 2024 sebesar Rp 237.117.672.235,38 melampaui target APBP-Perubahan Rp 214.600.706.083 atau dengan Capaian 110,49%. Capaian ini lebih baik dari tahun 2023 dimana Realisasi PAD terhadap Target APBD-P

dengan capaian 98,11%. Realisasi PAD menurun pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatannya pada tahun 2023 sebesar 9,20% sedang tahun 2024 sebesar 11,99%, dimana LRA Pendapatan Kabupaten masih belum di audit BPK. Masih ada kemungkinan angka peningkatan lebih besar lagi setelah audit. Capaian 110,49% ini didukung 3 Sumber PAD yang mendukung Pertumbuhan PAD, yakni Pajak Daerah meningkat 2,89%, Retribusi Daerah 1065,21%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22,67%. Hanya pada sumber Lain-lain PAD yang Sah menurun di -43,55%. Retribusi meningkat drastis karena Pendapatan BLUD yang ada di Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2023, masuk ke Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung juga membantu peningkatan dengan realisasi Rp 3,79 Milyar. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra, maka Capaiannya masih diangka 98,99%, sehingga masih banyak yang harus diperhatikan untuk meningkatkan realisasi Jumlah PAD.

Jika dilihat dari Indikator dari Sasaran Kegiatan Kabid PRP, yakni persentase OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target, realisasinya 100%. Semua OPD Penghasil PAD, yakni berjumlah 15 SKPD, 2 Rumah Sakit, dan 23 UPT bersepakat pada target PAD APBD Perubahan 2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 18 September 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan Penetapan PAD pada APBD 2025 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Jika dilihat dari Indikator dari Sasaran Kegiatan Kabid PRP lainnya, yakni Persentase Realisasi PAD terhadap Target yang Disepakati, dengan target 100%, Realisasinya pada angka 110,49%. 3 Sumber PAD yang mendukung Pertumbuhan PAD, yakni Pajak Daerah meningkat 2,89%, Retribusi Daerah 1065,21%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22,67%.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan pada tahun 2024 untuk keberhasilan pada Indikator-Indikator ini, yaitu :

1. Selalu melakukan Rapat Koordinasi per triwulan dan Kunjungan pada waktu tertentu ke SKPD pengasil Pendapatan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Penyusunan Kertas Kerja Target Pendapatan berdasarkan potensi tiap OPD pengelola pendapatan
3. SKPD Penghasil Retribusi, dan Rumah Sakit dan Puskesmas mulai menggunakan QRIS dari Bank Kalsel (Bank RKUD)
4. Melakukan Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama Universitas Lambung Mangkurat

Gambar 3.6
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pendapatan Dipimpin Pj. Bupati



Sumber : Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda, dan Pelaporan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2024 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

1. Banyak Wajib Pajak Daerah yang tidak menggunakan Bank Kalsel (Bank RKUD) sehingga dapat mengurungkan niat Wajib Pajak Daerah membayar, serta dalam pencatatan transaksi tidak terekam karena bukan transfer dari Bank RKUD.
2. Realisasi PAD selalu berpotensi tidak maksimal atau tidak sesuai target APBD
3. Adanya Pajak Baru yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomo 35 Tahun 2023

Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

1. Menjalankan Digitalisasi (Transaksi Non Tunai) hasil kerjasama dengan Bank Kalsel, dan Bank Mandiri dalam transaksi Pajak Daerah.
2. Melanjutkan pengendalian dan pengawasan pada retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang Sah melalui kunjungan dan rapat koordinasi;
3. Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel terkait Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Perda Kab Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024.
4. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) agar Retribusi Parkir menggunakan karcis berporporasi dari Bapenda, dan pihak ketiga yang mengelola hanya mendapatkan imbal jasa.
5. Berkoordinasi dengan BPKAD dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal di tahun 2025 sebesar 50 Milyar agar mendapatkan dividen di tahun 2026.
6. Berkoordinasi dengan BPKAD dalam mendepositokan kembali Saldo APBD yang belum digunakan

d. Sasaran Sekretaris

Tabel 3.36
Cara Hitung Indikatornya Sekretaris

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG	Relisasi
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai dari Kompenen Perencanaan di LHE AKIP dari Penilaian Inspektorat	24,60
Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	Nilai dari Kompenen Pengukuran di LHE AKIP dari Penilaian Inspektorat	24,60
Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	Nilai dari Kompenen Pelaporan di LHE AKIP dari Penilaian Inspektorat	12,30
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai dari Kompenen Evaluasi Internal di LHE AKIP dari Penilaian Inspektorat	20,00
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Hasil Pengolahan Kuisisioner	81,94

Sumber : LHE AKIP dari 2024 dan Sub Bagian Perencanaan

Tabel 3.37
Target dan Realisasi dari Indikator Program Sekretaris Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	25,80	26,01	24,00	24	24,60	102,5%
Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	21,25	23,01	24,00	24	24,60	102,5%
Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12,14	11,505	12,00	12	12,30	102,5%

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	23,92	16,675	19,25	20	20,00	100%
Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	81,07 (B)	84,72 (A)	88,89 (A)	90	81,94	91,04%

Sumber : LHE AKIP 2020-2023 dan Sub Bagian Perencanaan

Tabel 3.38
Target, Realisasi dan Capaian dari Indikator Program Sekretaris Tahun 2022-2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	24	26,01	108,37%	24	24,00	100%	24	24,60	102,5%
Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	24	23,01	95,87%	24	24,00	100%	24	24,60	102,5%
Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12	11,505	95,87%	12	12,00	100%	12	12,30	102,5%
Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	17	16,675	98,09%	18	19,25	106,94%	20	20,00	100%
Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	80 (B)	84,72	105,90%	81	88,89	109,74%	90	81,94	91,04%

Sumber : LHE AKIP 2021-2023 dan Sub Bagian Perencanaan

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Program Sekretaris Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	24	24,60	102,5%	26	94,61%
Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	24	24,60	102,5%	26	94,61%
Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12	12,30	102,5%	12,7	96,85%
Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	20	20,00	100%	20,7	96,62%
Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	90	81,94	91,04%	100	81,94%

Sumber : LHE AKIP 2021-2023 dan Sub Bagian Perencanaan

Ada 5 Sasaran Program yang menjadi Kinerja Utama Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, yakni 4 Nilai Komponen yang ada di AKIP dan Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Sekretaris memiliki 2 Kepala Sub Bagian, 3 JFU, dan 3 PTT dengan anggaran Rp 11.558.706.652,-, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 10.582.259.137,- (91,55%), dengan 1 Program, 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Hasil LHE AKIP Tahun 2023 yang dinilai pada tahun 2024 menunjukkan realisasi Nilai Komponen Perencanaan mendapatkan nilai 24,60. Ini diatas target dengan nilai 24 atau dengan capaian 102,5%. Ada

peningkatan nilai dari tahun 2023 dimana nilainya 24. Nilai di tahun 2024 ini masih dibawah nilai tahun 2022 dimana Komponen Perencanaan mendapatkan nilai 26,01. Meningkatnya Komponen Perencanaan ini dengan memperhatikan kelengkapan dan analisa terhadap Pohon Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Kerja, RKA dan DPA, dan Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi.

Komponen Pengukuran mendapatkan nilai 24,60. Ini diatas target dengan nilai 24 atau dengan capaian 102,5%. Ada peningkatan nilai dari tahun 2023 dimana nilainya 24, dan 2022 nilainya 23,01. Meningkatnya Nilai Komponen Pengukuran ini dengan memperhatikan monitoring per triwulan serta berjenjang.

Komponen Pelaporan mendapatkan nilai 12,30. Ini diatas target dengan nilai 12 atau dengan capaian 102,5%. Ada peningkatan nilai dari tahun 2023 dimana nilainya 12, dan tahun 2022 nilainya 11,505. Meningkatnya Nilai Pelaporan ini dengan memperhatikan kelengkapan dokumen Renstra, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja.

Komponen Evaluasi Internal mendapatkan nilai 20 dari nilai target 20 atau dengan capaian 100%. Ada peningkatan nilai dari tahun 2023 dimana nilainya 19,25, dan tahun 2022 nilainya 16,675. Meningkatnya Nilai Pelaporan ini dengan memperhatikan analisa perbaikan berdasarkan monitoring yang sudah dilakukan.

Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan mendapatkan nilai 81,94. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017, perolehan 81,94 masuk pada kategori B (Baik). Realisasi 81,94 terhadap taget dengan nilai 90, sehingga capaiannya 91,04%. Pelayanan Kesekretariatan baik itu Keuangan, Kepegawaian, Pengandaan dan Pemeliharaan BMD, Umum, dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah sudah dimaksimalkan dengan merealisasikan semua yang sudah dianggarkan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan di Sekretariat untuk keberhasilan pada Indikator-Indikator ini, yaitu

1. Mengkoordinasi pembuatan Dokumen yang diperlukan pada Komponen Perencanaan seperti Pohon Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Kerja, RKA dan DPA, dan Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi.

2. Mengkoordinasi Bidang-Bidang dan Sub Bagian di bawah Sekretariat dalam pembuatan Pohon Kinerja sebagaimana saran dari Kemepan-RB
3. Mengkoordinasi pada monitoring per triwulan dan berjenjang pada Komponen Pengukuran
4. Mengkoordinasi Sub Bagian dan Bidang-Bidang dalam pembuatan Renja 2025, dan Renja Perubahan 2024, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja besarakan arahan Bagian Organisasi dan Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagai kelengkapan Komponen Pelaporan
5. Melakukan Evaluasi Internal bersama Inspektorat menggunakan aplikasi berbasis website, yakni sakuntala.tanahlautkab.go.id
6. Mengkoordinasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk merencanakan anggaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 agar realisasi bisa maksimal
7. Menghimbau PPTK untuk segera melaksanakan kegiatan agar Percepatan realisasi anggaran bisa terlaksana sesuai Intruksi Bupati Nomor 900/1597/BPKAD/VII/2024.
8. Mengarahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk segera merealisasikan kebutuhan kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah.
9. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk merencanakan kebutuhan tahun 2025.
10. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk kebutuhan Gaji dan Tunjangan tahun 2025 agar ke depan realisasi dapat maksimal.

Gambar 3.7
Asistensi Laporan Kinerja untuk Pelaporan dan Evaluasi Internal



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2024 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

1. Adanya aplikasi terbaru, yakni website esakip.tanahlaut.go.id hasil kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus diperhatikan Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dimana Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Internal direkap per triwulan disana.
2. Adanya arahan Kemenpan-RB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk memperbaiki Pohon Kinerja.
3. Realisasi insentif atas Pajak Daerah sempat tertunda dikarenakan peraturan yang belum mendukung
4. Realisasi anggaran dari PPTK terbilang kecil namun dengan SPJ yang banyak sehingga penyerapan realisasi secara perlahan.
5. Penyedia Pengadaan kebanyakan berada di Banjarmasin sehingga harus keluar kota dalam pengurusan

Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

1. Kembali mengkoordinasi pembuatan Dokumen yang diperlukan pada Komponen Perencanaan
2. Kembali mengkoordinasi pada monitoring per triwulan dan berjenjang pada Komponen Pengukuran

3. Kembali mengkoordinasi Sub Bagian dan Bidang-Bidang dalam Komponen Pelaporan
4. Mengarahakan Sub Bagian Perencanaan dalam persiapan Evaluasi Internal
5. Berkoordinasi dengan Kepala Badan, Bidang-Bidang, dan Sub-Sub Bagian untuk persiapan pemindahan ke Kantor Baru
6. Berkoordinasi pada setiap Bidang dan Sub Bagian apabila SOTK terbaru dikukuhkan di tahun 2025
7. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk merencanakan mengenai administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah pada tahun 2026.
8. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk kebutuhan Gaji dan Tunjangan tahun 2026 agar ke depan realisasi dapat maksimal.
9. Berkoordinasi dengan Bidang-Bidang, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian untuk memaksimalkan Penilaian Mandiri SPIP.

4. Eselon IV (Pejabat Pengawas)

a. Sasaran Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.40
Cara Hitung Indikatornya Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG	Relisasi
Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	(Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan/Target Dokumen Perencanaan)*100 (8 ÷ 8)*100 = 100%	100%
Menciptakan Pelayanan Adminitrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner	3,28

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.41
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu			Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2021	100	100	100	-	-	-
2022	100	100	100	-	-	-
2023	100	100	100	-	-	-
2024	100	100	100	3	3,28	109,33%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2024

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	100%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Ada 2 Sasaran Kegiatan yang menjadi Kinerja Utama Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yakni Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik, dan Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki 2 JFU, dan 1 PTT dengan anggaran Rp 8.479.315.555,-, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 7.713.164.019,- (90,96%), dengan 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

Realisasi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu di angka 100%, dimana ini selalu dilakukan dari tahun 2022 dan 2023. Ada 8 Dokumen yang disiapkan pada tahun 2024, yakni DPA 2024, DPA Perubahan 2024, RKA-P 2024, RKA 2025, Renja 2025, Renja Perubahan 2024, dan Laporan Kinerja 2023, dan LPPD 2023. Sedangkakan, Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ada di angka 3,28. Ini adalah indikator baru dimana tahun 2022 dan 2023 belum digunakan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk pencapaian indikator pada tahun 2024, yaitu

1. Pembuatan Dokumen yang diperlukan pada Komponen Perencanaan seperti Pohon Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator

Kinerja Individu (IKI), Rencana Kerja, RKA dan DPA, dan Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi.

2. Membuat dan menganalisa Pohon Kinerja sebagaimana saran dari Kemapan-RB
3. Melaksanakan pada monitoring per triwulan dan berjenjang pada Komponen Pengukuran
4. Melaksanakan pembuatan Renja 2025, dan Renja Perubahan 2024, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja sebagai kelengkapan Komponen Pelaporan
5. Menyiapkan Bahan Bahan untuk melakukan Penilaian Evaluasi Internal
6. Memberikan PPTK rekap transaksi agar percepatan realisasi anggaran terlaksana.
7. Membantu PPTK melakukan pergeseran RAK apabila memungkinkan untuk membantu percepatan realisasi

Gambar 3.8
Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2024



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

1. Adanya aplikasi terbaru, yakni website esakip.tanahlaut.go.id hasil kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus diperhatikan Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dimana Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Internal direkap per triwulan disana.

2. Adanya arahan Kemenpan-RB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk memperbaiki Pohon Kinerja.
3. Realisasi insentif atas Pajak Daerah sempat tertunda dikarenakan peraturan yang belum mendukung
4. Realisasi anggaran dari PPTK terbilang kecil namun dengan SPJ yang banyak sehingga penyerapan realisasi secara perlahan.
5. Realisasi tertunda karena RAK tidak cukup atau berada diposisi bulan selanjutnya.
6. Adanya aplikasi baru, SIKAT di triwulan akhir dan harus dikejar penginputannya.

Adapun Upaya yang akan dilakukan Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan pada Tahun 2025, yaitu

1. Melaksanakan pembuatan Dokumen yang diperlukan pada Komponen Perencanaan
2. Melaksanakan pada monitoring per triwulan dan berjenjang pada Komponen Pengukuran
3. Melaksanakan Sub Bagian dan Bidang-Bidang dalam Komponen Pelaporan
4. Melaksanakan dan Menyiapkan Penilaian Evaluasi Internal
5. Menganalisa Anggaran Gaji dan Tunjangan tahun 2025 agar dapat dimaksimalkan pada kesempatan perubahan 2025.
6. Menganalisa kebutuhan Gaji dan Tunjangan tahun 2026 agar ke depan realisasi dapat maksimal.

b. Sasaran Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.43
Cara Hitung Indikatornya Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA HITUNG	Relisasi
Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	((Realisasi dari Sub Kegiatan/Target Sub Kegiatan)*100 (5 ÷ 5)*100 = 100%	100%
Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner	3,28
Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Hasil Pengolahan Kuisisioner	3,28
Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner	3,28
Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner	3,28

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.44
Target dan Realisasi dari Indikator Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021-2024

	Realisasi			Tahun 2024		
	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	0%	66,67%	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	3	3,28	109,33%
Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	-	-	-	3	3,28	109,33%
Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3	3,28	109,33%
Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	3	3,28	109,33%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.45
Target, Realisasi, dan Capaian dari Indikator Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2022-2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	-	-	-	-	-	-	3	3,28	109,33%
Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	-	-	-	-	-	-	3	3,28	109,33%
Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	-	-	-	-	-	-	3	3,28	109,33%
Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	-	-	-	-	-	-	3	3,28	109,33%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.46
Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan Kasubbag Umum dan Kegawaian Tahun 2024

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	100%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	72 Unit	100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	39 Unit	88,63%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian

Ada 5 Sasaran Kegiatan yang menjadi Kinerja Utama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana tabel di atas. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Sub Bagian memiliki 1 JFU, dan 2 PTT dengan anggaran Rp 3.079.391.097,-, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 2.869.095.118,- (93,17%), dengan 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.

Realisasi Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian di angka 100%, dimana ini lebih baik dari tahun 2023 yang diangka 66,67 dan tahun 2022 tidak ada realisasi atau 0%. Pengadaan Pakaian Dinas sebanyak 1 Paket dan Pelatihan Pegawai sebanyak 4 Orang sudah dilaksanakan semua. Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2024 ada diangka 3,28. Ini adalah indikator baru dan belum pernah dihitung pada tahun 2022 dan 2023. Administrasi Umum sudah dilaksanakan seperti komponen

instalasi listrik, perlengkapan kantor dan rumah tangga, penyediaan barang cetakan seperti amplop, map, fotokopi, penyediaan untuk pameran expo dan anggrek, makan minum rapat dan tamu, perjalanan dinas ke kecamatan dan luar daerah, serta pendukung pengarsipan.

Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien berada di angka 3,28. Ini juga adalah indikator baru dan belum pernah dihitung pada tahun 2022 dan 2023. Pengadaan yang sudah dilakukan yakni 72 Unit Mebel seperti Meja, Kursi dan Sofa, dan Pengadaan Sarana Prasarana seperti Pengadaan CCTV, sound system, tambah daya listrik, AC, dan Televisi.

Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berada diangka 3,28. Ini juga adalah indikator baru dan belum pernah dihitung pada tahun 2022 dan 2023. Jasa Penunjang Urusan yang sudah dilakukan adalah pembayaran rutin listrik, air ledeng, telpon, pembayaran perlengkapan dan jasa untuk acara reward Pajak Rumah Makan, dan Honor untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berada diangka 3,28. Ini juga adalah indikator baru dan belum pernah dihitung pada tahun 2022 dan 2023. Pemeliharaan Barang yang sudah dilakukan yaitu Penyediaan BBM untuk Mobil Dinas Kepala Badan, Penyediaan BBM untuk Mobil Sewa Kepala Bidang dan Sekretaris, Penyediaan Perawatan Mobil Operasional Putih, Penyediaan Perawatan Sepeda Motor Dinas, dan Penyediaan Perawatan AC, Printer, dan PC/Laptop.

Gambar 3.9

Pelayanan Administrasi Umum berupa Pelaksanaan Stand Expo Tanah Laut



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun kendala-kendala dalam merealisasikan indikator pada tahun 2024 ini, yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas yang anggaran berlebihan atau tidak sesuai perhitungan
2. Tidak banyaknya aktivitas ke Kecamatan dibanding tahun 2023 yang menyebabkan realisasi tidak maksimal
3. Adanya kenaikan harga koran sehingga pembelian hanya bisa sampai bulan Oktober.
4. Realisasi pembayaran telpon dan air yang rendah, tidak sesuai perkiraan, dimana anggarannya cukup besar
5. Ada 5 Peralatan Mesin yang sampai akhir tahun masih bagus kualitasnya sehingga anggaran tidak terealisasi.

Adapun upaya yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu :

1. Merealisasikan pengadaan yang sudah dianggarkan untuk mendukung percepatan anggaran.
2. Menganalisa anggaran tahun 2025 pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang apabila kurang efektif, dapat dipindahkan alokasinya pada kesempatan Perubahan Anggaran
3. Menganalisa anggaran yang diperlukan untuk keperluan di tahun 2026 untuk mendukung kegiatan
4. Mempersiapkan pindahan ke Kantor Baru.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah melampaui target APBD-P sebesar 103,21%. Pajak Daerah terealisasi Rp 54,8 Milyar atau dengan persentase 103,21%, lebih baik dari tahun 2023 di angka 51,9 Milyar. Retribusi Daerah (Penyewaan Bangunan dan Pemakaian Ruangan) terealisasi Rp 90,6 Juta, lebih rendah dari tahun 2023 di angka Rp 146 Juta, Hal ini dikarenakan Aula di Bapperida sedang direnovasi sehingga tidak maksimal untuk dimanfaatkan. Sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah (Pendapatan Denda Pajak Daerah) terealisasi Rp 348,8 Juta., lebih tinggi dari tahun 2023 di angka Rp 272,6 Juta. Sedangkan Belanja Operasi terealisasi 92,35% dan Belanja Modal 92,44% atau dengan rata-rata 92,36%. Realisasi belanja tahun ini lebih baik dari tahun 2023 yang

nilai rata-ratanya 84,56%. Realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah ini dapat tercapai dengan menganalisa kembali kebutuhan kegiatan yang kemudian dilakukan pergeseran, pengurangan, dan penambahan anggaran pada kesempatan perubahan anggaran tahun 2024, serta percepatan realisasi kegiatan dan memperhatikan rekap belanja dari masing-masing PPTK.

Tabel 3.47
Anggaran dan Realisasi APBD 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	Persentase
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	53.127.625.000,00	54.834.264.688,00	103,21
Pajak Daerah	53.010.000.000,00	54.394.829.265,00	102,61
Retribusi Daerah	117.625.000,00	90.588.500,00	77,01
Lain-Lain PAD yang Sah		348.846.923,00	100,00
Belanja Daerah	14.374.692.160	13.276.045.267	92,36
Belanja Operasi	13.288.152.750	12.271.610.267	92,35
Belanja Modal	1.086.539.410	1.004.435.000	92,44

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.48
Tabel Anggaran Realisasi menurut Sasaran dan Program

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	1,31	11,99		2.815.985.508	2.693.786.130	95,66
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	2.815.985.508	2.693.786.130	95,66
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai AKIP Bapenda	81	81,5		11.558.706.652	10.582.259.137	91,55
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.558.706.652	10.582.259.137	91,55

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.49
Analisa Efisiensi dari Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(3-2)=(4)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	95,66	915,27	819,61%
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	91,55	100,62%	9,07%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Efisiensi pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berada di angka 819,61%. Realisasi anggaran terbesar pada Sasaran ini adalah pada Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan (PRP) dengan nilai Rp 1.206.097.300 (95,40%) terhadap Anggaran Bidanganya, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah (P2D) terealisasi Rp 936.386.830,- (94,98%) terhadap anggaran Bidanganya, dan Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda, dan Pelaporan terealisasi Rp 551.302.000,- (97,42%) terhadap anggaran bidanganya. Kegiatan yang memerlukan anggaran besar seperti Reward kepada Pemungut Pajak Rumah Makan, Honor ke Tim Kolektor PBB-P2, Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah ke Lapangan Perbaikan pelayanan seperti membeli mesin antri, Sosialisasi Pajak Daerah ke Kecamatan, menunjukkan pekerjaan yang berkualitas dikarenakan berpartisipasi terhadap Efisiensi dari Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran.

Anggaran yang tidak terealisasi paling besar secara keuangan ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Terdapat sisa Rp 761.673.935. Hal ini dikarenakan kelebihan menganggarkan Gaji beserta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Adapun anggaran lainnya tidak terealisasi dikarenakan harga pembelian yang lebih rendah dari harga anggaran, dan tidak terealisasinya PPN.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022-2023

Tabel 3.50
Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023-2024

Program / Kegiatan	Tahun		Anggaran	
	2023	2024	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	✓	✓	11.016.614.374	10.582.259.137
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓	✓	9.606.985	12.940.425
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✓	✓	8.927.525.470	8.466.375.130
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	✓	✓	18.000.000	49.989.100

Program / Kegiatan	Tahun		Anggaran	
	2023	2024	2023	2024
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	✓	✓	1.107.511.638	1.958.982.740
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	151.180.241	434.425.037
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	463.432.530	473.786.220
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	339.357.510	162.208.000
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	✓	✓	2.192.787.996	2.815.985.508
a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	✓	✓	2.192.787.996	2.815.985.508
TOTAL			13.209.402.370	14.374.692.160

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang sudah terealisasi pada Tahun 2024 secara ringkas, yaitu :

1. Realisasi IKU Pertumbuhan PAD sebesar 11,99%, berhasil di atas target 1,31%, atau dengan capaian 915,27%.
2. Realisasi IKU Nilai AKIP sebesar 81,5%, berhasil di atas target 81%, atau dengan capaian 100,62%
3. Realisasi Indikator Kinerja Program, yakni Jumlah Pajak Daerah Rp 54.191.657.384, berhasil di atas target Rp 53.010.000.000 atau dengan capaian 102,23%.
4. Realisasi Indikator Kinerja Program, yakni Jumlah PAD Rp. 237.117.672.235,38, berhasil di atas target Rp 214.600.706.083,00 atau dengan capaian 110,49%.
5. Realisasi Indikator Kinerja Program, yakni Nilai Komponen Perencanaan di angka 24,60, berhasil di atas target 24, atau dengan capaian 102,5%
6. Realisasi Indikator Kinerja Program, yakni Nilai Komponen Pengukuran di angka 24,60, berhasil di atas target 24, atau dengan capaian 102,5%
7. Realisasi Indikator Kinerja Program, yakni Nilai Komponen Pelaporan di angka 12,30, berhasil di atas target 12, atau dengan capaian 102,5%
8. Realisasi Indikator Kinerja Program, yakni Nilai Komponen Evaluasi Internal di angka 20, sesuai target 20, atau dengan capaian 100%
9. Realisasi Indikator Kinerja Program, yakni Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan di angka 81,94, di bawah target 90, atau dengan capaian 91,04%
10. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Persentase Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban di angka 50,77%, berhasil di atas target 25% atau dengan capaian 203,08%.
11. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Persentase Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial di angka 104,49%, berhasil diatas target 100% atau dengan capaian 104,49%.
12. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Persentase OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target di angka 100%, sesuai target 100% atau dengan capaian 100%.
13. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Persentase Realisasi PAD terhadap Target yang Disepakati di angka 104,49%, berhasil di atas target 100% atau dengan capaian 104,49%

14. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu di angka 100%, sesuai angka target 100% atau dengan capaian 100%.
15. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di angka 3,28, berhasil di atas target 3 atau dengan capaian 109,33%.
16. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian di angka 100%, sesuai angka target 100% atau dengan capaian 100%.
17. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah di angka 3,28, berhasil di atas target 3 atau dengan capaian 109,33%.
18. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien di angka 3,28, berhasil di atas target 3 atau dengan capaian 109,33%.
19. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di angka 3,28, berhasil di atas target 3 atau dengan capaian 109,33%.
20. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di angka 3,28, berhasil di atas target 3 atau dengan capaian 109,33%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi Peningkatan Kinerja yang akan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2024, yaitu:

1. Menjalankan Digitalisasi (Transaksi Non Tunai) hasil kerjasama dengan Bank Kalsel, dan Bank Mandiri dalam transaksi Pajak Daerah.
2. Melakukan penyesuaian harga per meter di NJOP dalam PBB-P2 karena selama 13 tahun belum diadakan penyesuaian.
3. Rebranding aplikasi Citigov dengan sebutan “Bepadah Bungas Tu Pang” agar menjadi atensi Wajib Pajak Daerah.
4. Melanjutkan kerjasama dengan APH (Kejaksaaan) dalam penagihan piutang pajak daerah serta pengawasan perpajakan bersama dengan Satpol-PP
5. Melanjutkan pengendalian dan pengawasan pada retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang Sah melalui kunjungan dan rapat koordinasi;

6. Memberikan Reward 3 Buah Sepeda Motor dengan cara undian kepada masing-masing Wajib PBB-P2, Konsumen (Wajib Pajak) pada Rumah Makan/Restoran dan Hotel yang menggunakan Tapping Box, dan Pemungut Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel yang menggunakan Tapping Box
7. Melalui BPKAD dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal di tahun 2025 sebesar 50 Milyar agar mendapatkan dividen di tahun 2026.
8. Melalui BPKAD, kembali mendepositokan Saldo APBD yang belum digunakan.
9. Mempertahankan Pohon Kinerja sesuai saran Kemenpan-RB, dan memperhatikan perubahan SOTK pada tahun 2025
10. Menggunakan website esakip.tanahlaut.go.id untuk mendukung dan mempermudah penilaian AKIP
11. Meminta bantuan Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda, dan Pelaporan untuk memperoleh LRA dari 3 Kabupaten lain sehingga dapat membandingkan Realisasi IKU Eselon II.
12. Menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan dengan mempertimbangkan Laporan Kinerja tahun Sebelumnya serta Target PAD pada APBD Perubahan.

CASCADING KINERJA 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

TUJUAN RPD	TUJUAN RKPД : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	INDIKATOR : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
SASARAN RPD	SASARAN RKPД : Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah
	INDIKATOR : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
	SASARAN RKPД : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	INDIKATOR : Nilai SAKIP KABUPATEN
TUJUAN OPD	TUJUAN OPD 1 : Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah
	INDIKATOR : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
	TUJUAN OPD 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	INDIKATOR : Nilai SAKIP KABUPATEN
SASARAN OPD	SASARAN 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
	INDIKATOR : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
	SASARAN 2 : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda
	INDIKATOR : Nilai AKIP Bapenda

PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SASARAN PROGRAM	<p>SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan</p> <p>SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Pengukuran</p> <p>SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan</p> <p>SASARAN 4 : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal</p> <p>SASARAN 5 : Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>SASARAN 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah</p> <p>SASARAN 2 : Meningkatnya Pembinaan PAD</p>
	<p>INDIKATOR 1 : Nilai Komponen Perencanaan</p> <p>INDIKATOR 2 : Nilai Komponen Pengukuran</p> <p>INDIKATOR 3 : Nilai Komponen Pelaporan</p> <p>INDIKATOR 4 : Nilai Komponen Evaluasi Internal</p> <p>INDIKATOR 5 : Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan</p>	<p>INDIKATOR 1 : Jumlah Pajak Daerah</p> <p>INDIKATOR 2 : Jumlah PAD</p>

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah
SASARAN KEGIATAN	Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah 2. Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah 3. Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target 4. Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD
	INDIKATOR : Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	INDIKATOR : Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>INDIKATOR 1 : %Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban</p> <p>INDIKATOR 2 : % Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial</p> <p>INDIKATOR 3 : % OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target</p> <p>INDIKATOR 4 : % Realiasi PAD terhadap Target yang Disepakati</p>

KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
SASARAN KEGIATAN	Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal
	INDIKATOR : Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	INDIKATOR : Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah

KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN KEGIATAN	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik
	INDIKATOR : Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	INDIKATOR : Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
SASARAN KEGIATAN	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	
	INDIKATOR : Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

SUB KEGIATAN	SESUAI KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
OUTPUT	SESUAI KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023

**Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024**

- Kabupaten : Tanah Laut
 Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah
 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
 Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
 c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	$(\text{Jumlah PAD Tahun Berkenaan} - \text{Jumlah PAD tahun Sebelumnya}) / \text{Jumlah PAD tahun Sebelumnya} * 100$	Badan Pendapatan Daerah



Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
1. Jumlah Pajak Daerah

Meningkatnya Pembinaan PAD
1. Jumlah PAD

Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
1. %Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban

Meningkatnya sumber potensi objek penerimaan pajak daerah
1. % Penerimaan Pajak dan Sektor Potensial

Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Penetapan Target
1. %OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target

Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD
1. % Realisasi PAD terhadap Target yang Disepakati

Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah
1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
1. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
1. Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
1. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
1. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

Terpenuhinya NJOP sesuai Ketentuan
1. Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya

Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1. Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
1. Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah

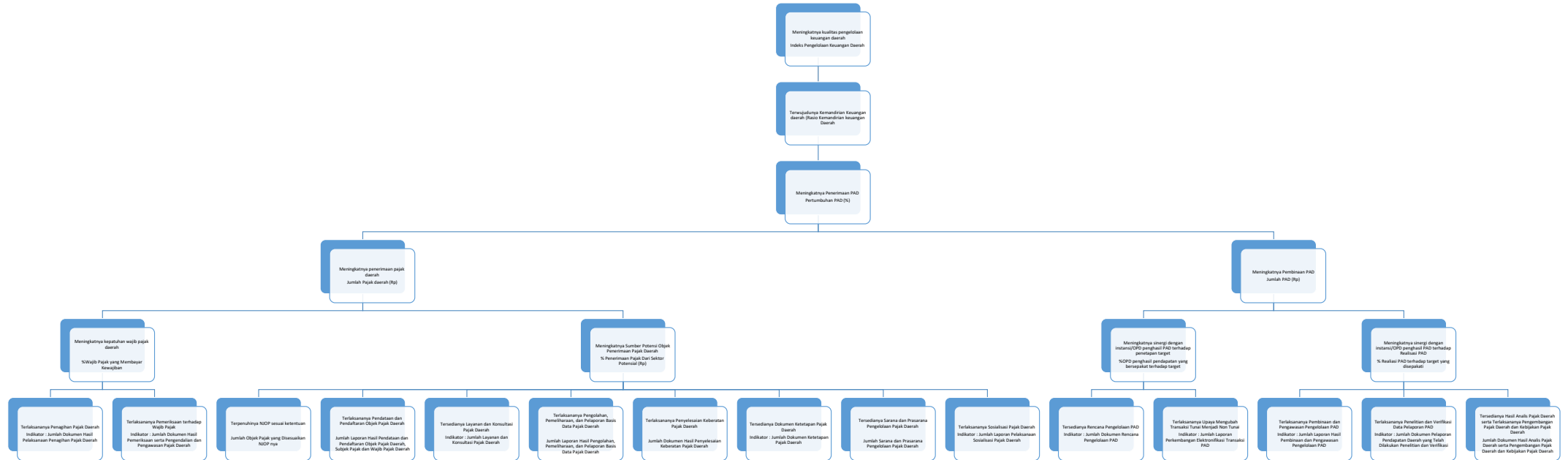
Tersedianya Rencana Pengelolaan PAD
1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan PAD

Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai
1. Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi PAD

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD
1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD

Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PAD
1. Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAMSIR RAHMAN


Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

SYAMSIR RAHMAN

Pihak Pertama,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	1,31%
2.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai AKIP Bapenda	81

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.940.425,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.466.375.130,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 49.989.100,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.958.982.740,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 434.425.037,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 473.786.220,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 162.208.000,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.815.985.508,-

Pelaihari, 19 September 2024


Pj. Bupati Tanah Laut,

SYAMSIR RAHMAN


Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24
2.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12
4.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.940.425,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.466.375.130,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 49.989.100,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.958.982.740,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 434.425.037,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 473.786.220,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 162.208.000,-


 Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
 NIP. 19680916 199010 1 001

Pelaihari, 19 September 2024
 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
 NIP. 19661025 198602 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp. 53.010.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.264.210.678,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 1.146.315.589,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 117.895.089,-

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZALDIN NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp. 53.010.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN


No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 985.890.341,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 140.048.777,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 370.478.656,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 34.754.387,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 440.608.521,-

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,


Drs. H. RUJDI SMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,


H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Pembinaan PAD	Jumlah PAD	Rp 214.600.706.083

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 565.884.489,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 57.608.008,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 413.531.481,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 94.745.000,-

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain,
Retda dan Pelaporan,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,



MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	%Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	25 %

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.264.210.678,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 1.146.315.589,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 117.895.089,-

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZ Aidin NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah	% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	100%

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
3.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen
4.	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 985.890.341,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 140.048.777,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 370.478.656,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 34.754.387,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 440.608.521,-


Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUQI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Pertama,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	100%
2.	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD	% Realisasi PAD terhadap Target yang Disepakati	100%

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Rencana Pengelolaan PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan PAD	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PAD	Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen
3.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	2 Laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 565.884.489,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 57.608.008,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 413.531.481,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 94.745.000,-

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain,
Retda dan Pelaporan,



Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IMPRON, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%
2.	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan
4.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen


PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.940.425,-
		▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 8.006.834,-
		▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.933.591,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.466.375.130,-
		▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.464.982.754,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.392.376,-

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWAHYUDOTO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%
2.	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	3
3.	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3
4.	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3
5.	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	4 Orang
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket
5.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
6.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
7.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
8.	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
10.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen
11.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit
12.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	9 Unit
13.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
15.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
16.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
17.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
18.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 49.989.100,-
		▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 21.989.100
		▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 28.000.000,-
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.958.982.740,-
		▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.996.180,-
		▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 597.675.009,-
		▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 11.358.082,-
		▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.996.926 ,-
		▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.000.000,-
		▪ Penyediaan Bahan/Material	Rp 15.000.000,-
		▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.293.189.762,-
		▪ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 8.766.781,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 434.425.037,-
		▪ Pengadaan Mebel	Rp 149.858.637,-
		▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 284.566.400,-
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 473.786.220,-
		▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.000.000,-
		▪ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.620.000,-
		▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 388.166.220,-
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 162.208.000,-
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 16.260.000,-
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 114.409.000,-
		▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 31.539.000,-

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002



ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUDI ISMANTO M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIR RAHMAN**
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

RUDI ISMANTO M.SI

NIP. 196809161990101001

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		
	1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda		
	1	Nilai AKIP Bapenda	Nilai

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5.02.04. Program PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 2.989.166.244,00
5.02.04.2.01. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.989.166.244,00
5.02.04.2.01.11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 944.857.089,00
5.02.04.2.01.13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 164.940.069,00
5.02.04.2.01.05. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 153.698.777,00
5.02.04.2.01.06. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 636.603.809,00
5.02.04.2.01.08. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 49.984.387,00
5.02.04.2.01.07. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 0,00
5.02.04.2.01.09. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 361.943.621,00
5.02.04.2.01.12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 0,00
5.02.04.2.01.04. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 0,00
5.02.04.2.01.03. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 0,00
5.02.04.2.01.01. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 99.962.011,00
5.02.04.2.01.15. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp. 0,00
5.02.04.2.01.14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 99.995.000,00
5.02.04.2.01.10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 477.181.481,00
5.02.04.2.01.02. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 0,00
5.02.01. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10.742.067.445,00
5.02.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.940.425,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5.02.01.2.01.01. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 8.006.834,00
5.02.01.2.01.07. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.933.591,00
5.02.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.067.287.230,00
5.02.01.2.02.01. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.065.894.854,00
5.02.01.2.02.03. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 1.392.376,00
5.02.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 49.989.100,00
5.02.01.2.05.02. SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 21.989.100,00
5.02.01.2.05.09. SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 28.000.000,00
5.02.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.324.726.188,00
5.02.01.2.06.01. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.996.180,00
5.02.01.2.06.02. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 199.961.264,00
5.02.01.2.06.03. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 11.358.082,00
5.02.01.2.06.05. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 24.996.926,00
5.02.01.2.06.06. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.000.000,00
5.02.01.2.06.07. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. 20.670.000,00
5.02.01.2.06.09. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.050.976.955,00
5.02.01.2.06.10. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 8.766.781,00
5.02.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 432.192.182,00
5.02.01.2.07.05. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 44.120.037,00
5.02.01.2.07.11. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 388.072.145,00
5.02.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 666.457.212,00
5.02.01.2.08.02. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 83.000.000,00
5.02.01.2.08.03. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 2.620.000,00
5.02.01.2.08.04. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 580.837.212,00
5.02.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 188.475.108,00
5.02.01.2.09.01. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 16.260.000,00
5.02.01.2.09.02. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 114.409.000,00
5.02.01.2.09.06. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 25.124.000,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5.02.01.2.09.09. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 10.983.828,00
5.02.01.2.09.10. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 21.698.280,00





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24
2.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12
4.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.940.425,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.067.287.230,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 49.989.100,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.324.726.188,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 432.192.182,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 666.457.212,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 188.475.108,-

Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

H.J. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,


MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

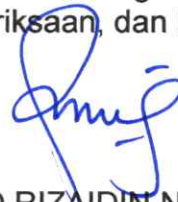
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp. 51.645.846.920

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.109.797.158,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 944.857.089,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 164.940.069,-

Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZ Aidin NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,


H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp. 51.645.846.920

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.202.230.594,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 153.698.777,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 636.603.809,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 49.984.387,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 361.943.621,-


Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Ors. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Pertama,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007



Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Pembinaan PAD	Jumlah PAD	Rp 214.500.706.083

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 677.138.492,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 99.962.011,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 477.181.481,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 99.995.000,-

Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDIISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain,
Retda dan Pelaporan,



Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Pertama,

MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001



Pihak Kedua,
Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	%Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	25 %

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.109.797.158,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 944.857.089,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 164.940.069,-

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZALDIN NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

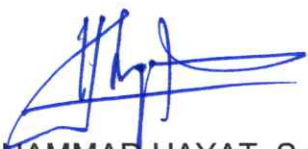
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,


H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah	% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	100%

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
3.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen
4.	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.202.230.594,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 153.698.777,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 636.603.809,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 49.984.387,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 361.943.621,-


Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Pertama,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	100%
2.	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD	% Realiasi PAD terhadap Target yang Disepakati	100%

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Rencana Pengelolaan PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan PAD	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PAD	Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen
3.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	2 Laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 677.138.492,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 99.962.011,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 477.181.481,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 99.995.000,-

Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain,
Retda dan Pelaporan,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001


Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IMPRON, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%
2.	Menciptakan Pelayanan Adminitrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
2.	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan
4.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen

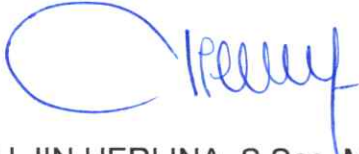
PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.940.425,-
		▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 8.006.834,-
		▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.933.591,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.067.287.230,-
		▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.065.894.854,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.392.376,-

Pelaihari, 1 Juli 2024

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWAHYUDOTO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 1 Juli 2024

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%
2.	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	3
3.	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3
4.	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3
5.	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	4 Orang
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
5.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
6.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
7.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
8.	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
10.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen
11.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit
12.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	3 Unit
13.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
15.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
16.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

No.	Kinerja Utama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
17.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
18.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit
19.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
20.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 49.989.100,-
		▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 21.989.100
		▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 28.000.000,-
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.324.726.188,-
		▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.996.180,-
		▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 199.961.264,-
		▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 11.358.082,-
		▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.996.926 ,-
		▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.000.000,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		▪ Penyediaan Bahan/Material	Rp 20.670.000,-
		▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.050.976.955,-
		▪ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 8.766.781,-
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 432.192.182,-
		▪ Pengadaan Mebel	Rp 44.120.037,-
		▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 388.072.145,-
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 666.457.212,-
		▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.000.000,-
		▪ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.620.000,-
		▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 580.837.212,-
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 188.475.108,-
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 16.260.000,-
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 114.409.000,-
		▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.124.000,-
		▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 10.983.828,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		<ul style="list-style-type: none">▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 21.698.280,-

Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain,



ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013

Capaian Kinerja Per Triwulan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi 2024				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (yoy)	1,31%	49,41%	31,02%	25,79%	11,99%	915,27%
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda	2.	Nilai AKIP Bapenda	81	-	81,50	-	-	100,62%

Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

No	Kinerja Utama (Sasaran Program)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp 53.010.000.000	Rp 11.314.435.104	Rp 24.573.460.298	Rp 39.774.885.998	Rp 54.191.657.384	102,23%

No	Kinerja Utama (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	% Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	25%	21,91%	29,87%	46,17%	50,77%	203,08%

Kinerja Utama (Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100%
Terlaksananya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100%

Kepala Pengelolaan Pajak Daerah

No	Kinerja Utama (Sasaran Program)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rp 53.010.000.000	Rp 11.314.435.104	Rp 24.573.460.298	Rp 39.774.885.998	Rp 54.191.657.384	102,23%

No	Kinerja Utama (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah	% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	100%	25.57%	51.84%	73.20%	104,49%	104,49%

Kinerja Utama (Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	100%
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	100%
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100%
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	100%

Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

Kinerja Utama (Sasaran Program)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Pembinaan PAD	Jumlah PAD	Rp 214.600.706.083	Rp 59.587.143.849	Rp 118.562.440.013	Rp 177.157.462.914	Rp. 237.117.672.235,38	110,49%

Kinerja Utama (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	100%	-	-	50%	100%	100%
Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD	% Realiasi PAD terhadap Target yang Disepakati	100%	27,78%	55,27%	82,55%	110,49%	110,49%

Kinerja Utama (Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Rencana Pengelolaan PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan PAD	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	100%
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PAD	Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	-	-	4 Dokumen	6 Dokumen	100%
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	100%

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	-	24,60			102,5%
Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24	-	24,60			102,5%
Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12	-	12,30			102,5%
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	-	20,00			100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90	-	81,94			91,04%

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kinerja Utama (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	-	-	-	100%	100%
Menciptakan Pelayanan Adminitrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	-	-	-	3,28	109,33%

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	100%
Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	100%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kepala Sub Bagian Umum Kepegawian

Kinerja Utama (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	-	-	-	100%	100%

Kinerja Utama (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Menciptakan Pelayanan Adminitrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	-	-	-	3,28	109,33%
Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	20%	40%	100%	100%	100%
Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	-	-	-	3,28	109,33%
Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3	-	-	-	3,28	109,33%
Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	-	-	-	3,28	109,33%
Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	-	-	-	3,28	109,33%

Kinerja Utama (Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	4 Orang	-	1 Orang	4 Orang	4 Orang	100%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%

Kinerja Utama (Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	5 Unit	7 Unit	14 Unit	14 Unit	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	2 Unit	12 Unit	21 Unit	39 Unit	88,63%

Pelaihari, 15 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



DIYAH RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

**MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA 2024-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANAH LAUT**

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah						Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Daerah	%	10,18	9,16	89,98%	12,75	71,84%	Realisasi Pendapatan Transfer 2,3 Triliun, lebih tinggi dari target APBD-P 2024
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	1,31	11,99	915,27%	3,88	309,02%	Semua Jenis Pajak Daerah terealisasi lebih 100% dari target APBD P 2024, kecuali BPHTB
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah			Jumlah Pajak Daerah	Rp	51.645.846.920	54.191.657.384	104,93%	86.564.782.504,87	62,60%	Pada Tahun 2025 akan diusahakan kenaikan PBB-P2 dan BPHTB dengan menaikkan NJOP
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	%Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	%	25,00	50,77	203,08%	27,00	188,04%	Menambah Reward Sepeda Motor di tahun 2025 untuk Wajib PBB-P2 yang lunas
					Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah	% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	%	100,00	104,49	104,49%	100,00	104,49%	Melanjutkan Penetapan Pajak MBLB harus dari yang berizin
			Meningkatnya Pembinaan PAD			Jumlah PAD	Rp	214.500.706.083	237.117.672.235,38	110,54%	239.527.881.285	98,99%	Menaikkan NJOP untuk PBB-P2 dan BPHTB, serta Retribusi Parkir menggunakan Karcis Porporasi dan Imbal Jasa
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	%	100	100,00	100,00%	100	100,00%	Penyusunan Kertas Kerja Target Pendapatan berdasarkan potensi tiap OPD pengelola pendapatan, dan Rapat Koordinasi
					Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD	% Realisasi PAD terhadap Target yang Disepakati	%	100	110,49	110,49%	100	110,49%	Penyusunan Kertas Kerja Target Pendapatan berdasarkan potensi tiap OPD pengelola pendapatan, dan Rapat Koordinasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	70,1	70,16	100,09%	80,1	87,59%	Komponen Pengukuran dan Komponen Evaluasi AKIP masih perlu ditingkatkan
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda					Nilai AKIP Bapenda	Nilai	81	81,5	100,62%	83,00	98,19%	Masih perlunya perbaikan pada perencanaan, pengukuran kinerja, dan Evaluasi Internal
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kualitas Perencanaan			Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	24	24,6	102,50%	26	94,62%	Perencanaan Kinerja sudah diusahakan memberikas informasi strategi pada Renja

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra	Catatan Penting
		DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Kualitas Pengukuran			Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	24	24,6	102,50%	26	94,62%	Perubahan target mempertimbangkan hasil money berkala
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan			Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12	12,3	102,50%	12,7	96,85%	Memperbaiki Pelaporan berdasarkan Saran dari Pemprov Kalsel dan Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut
			Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal			Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	20	20	100,00%	20,7	96,62%	Mengusahakan kesesuaian tindak lanjut LHE AKIP
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100,00%	100	100,00%	Pemenuhan Dokumen dan Laporan setiap tahunnya
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah			Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	90	81,94	91,04%	100,00	81,94%	Masih perlunya peningkatan pelayanan Kesekretariatan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	3	3,28	109,33%	3,5	93,71%	Masih perlunya peningkatan pelayanan Administrasi Keuangan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100,00%	100,000	100,00%	Pemenuhan kegiatan administrasi pegawai tiap tahunnya
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	3	3,28	109,33%	3,5	93,71%	Masih perlunya peningkatan pelayanan Administrasi Umum
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	3	3,28	109,33%	3,5	93,71%	Masih perlunya peningkatan pelayanan Pengadaan BMD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	3,28	109,33%	3,5	93,71%	Masih perlunya peningkatan pelayanan Jasa Penunjang

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir Renstra	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR Renstra	Catatan Penting
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	3	3,28	109,33%	3,5	93,71%	Masih perlunya peningkatan pemeliharaan BMD

MATRIKS KESELARASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Renstra 2024-2026					Perjanjian Kinerja Perubahan 2024				
TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	10,18		Kabupaten Tanah Laut
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	1,31	2.815.985.508	Kepala Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Pajak Daerah	Rp	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	53.010.000.000	2.250.101.019	Kepala Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan, serta Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
			Jumlah PAD	Rp	Meningkatnya Pembinaan PAD	Jumlah PAD	214.600.706.083	565.884.489	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	%Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	%	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	%Wajib Pajak yang Membayar Kewajiban	25%	1.264.210.678	Kepala Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan
			% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	%	Meningkatnya Sumber Potensi Objek Penerimaan Pajak Daerah	% Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial	100%	985.890.341	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
			% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	%	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD Penghasil PAD terhadap Penetapan Target	% OPD Penghasil PAD yang Bersepakat terhadap Target	100%	57.608.008	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
			% Realiasi PAD terhadap Target yang Disepakati	%	Meningkatnya Sinergi dengan Instansi/OPD penghasil PAD terhadap Realisasi PAD	% Realiasi PAD terhadap Target yang Disepakati	100%	508.276.481	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan PAD	Dokumen	Tersedianya Rencana Pengelolaan PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan PAD	2 Dokumen	57.608.008	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Renstra 2024-2026					Perjanjian Kinerja Perubahan 2024				
TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	140.048.777	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	370.478.656	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	34.754.387	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	440.608.521	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PAD	Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	413.531.481	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.146.315.589	Kepala Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan
		Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Terlaksananya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	117.895.089	Kepala Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	2 Laporan	94.745.000	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	70,1		Kabupaten Tanah Laut
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Bapenda		Nilai AKIP Bapenda	Nilai		Nilai AKIP Bapenda	81	11.558.706.652	Kepala Badan Pendapatan Daerah

Renstra 2024-2026					Perjanjian Kinerja Perubahan 2024				
TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	12.940.425	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
			Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24		
			Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12		
			Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20		
			Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90	11.545.766.227	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	12.940.425	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.006.834	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.933.591	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Sub Bagian
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	8.466.375.130	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	8.464.982.754	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Renstra 2024-2026					Perjanjian Kinerja Perubahan 2024				
TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.392.376	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	%	Memastikan Administrasi Kepegawaian Terlaksana dengan Baik	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	49.989.100	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	21.989.100	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	28.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	1.958.982.740	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.996.180	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	597.675.009	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.358.082	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.996.926	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renstra 2024-2026					Perjanjian Kinerja Perubahan 2024				
TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.293.189.762	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	8.766.781	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Anggaran yang Efisien	Indeks	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Anggaran yang Efisien	3	434.425.037	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	149.858.637	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	284.566.400	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	473.786.220	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

